



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
8. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2017-2022, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah

Provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

14. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2017-2022.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
21. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik pada tingkat Provinsi Banten.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan PD yang selanjutnya

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Provinsi; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Provinsi dengan IKU PD harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;

- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan PD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan PD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 April 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERANGKAT DAERAH PROVINSI
 BANTEN TAHUN 2017-2022

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1.	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.
2.	Harapan lama sekolah (Satuan: Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem	<p>Adapun rumus untuk penghitungan HLS adalah sebagai berikut:</p> $HLS_7 = \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i}$ <p>Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan Pemerintah yaitu program wajib belajar.	E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah P_i = Jumlah seluruh penduduk usia i i = Usia (7, 8,...,n)
3.	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (Satuan: %)	Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam rangka <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> .	Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan $= \frac{\Sigma \text{penduduk yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan}}{\Sigma \text{total penduduk Banten}} \times 100$
4.	Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH)	Dimana: $D_{0-\leq 1th}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\Sigma \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	$AKB = \frac{D_{0-\leq 1th}}{\Sigma \text{Lahir Hidup}} \times 1000$
5.	Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH)	Ibu yang meninggal pada masa kehamilan, bersalin dan nifas bukan karena kecelakaan atau sakit di wilayah tertentu selama satu tahun	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar $= \frac{\Sigma \text{ibu yang meninggal krn hamil, bersalin, nifas di suatu wilayah h ttt selama 1 thn}}{\Sigma \text{kelahiran hidup di wilayah h tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
6.	Angka Harapan Hidup (Satuan: Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
7.	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan: %)	Cakupan Penanganan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat
8.	Index Gini (Satuan: %)	Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
9.	LPE Sektor Perindustrian (Satuan: %)	Menunjukkan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang industri, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. < Kemenperin 2014>	<p>LPE Sektor Perindustrian</p> $Gi = \frac{PDRB_{i1} - PDRB_{i0}}{PDRB_{i0}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Gi = adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDRB_t = PDRB Sektor Perindustrian pada tahun t PDRB₀ = PDRB Sektor Perindustrian tahun dasar.</p>
10.	Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: %)	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <p>- kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
11.	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air	Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area yang telah ditangani}}{\text{Luas area rawan bencana}} \times 100\%$
12.	Pemenuhan tingkat layanan irigasi (Satuan: hektar)	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area irigasi yang terlayani}}{\text{Total luas area irigasi}} \times 100\%$
13.	Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	Cakupan rumah layak huni di Provinsi Banten.	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tidak layak huni di Provinsi Banten (tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni). Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan								
14.	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik (Satuan: %)	Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah gedung strategis yang telah dikelola dengan baik}}{\text{Jumlah gedung strategis}} \times 100\%$								
15.	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Hektar)	Cakupan luas penataan kawasan kumuh	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur luas kawasan kumuh di Provinsi Banten $\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$								
16.	cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional (Satuan: %)	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan	Alasan Pemilihan Indikator: Masih belum terkelolanya penangan sampah perkotaan di Provinsi Banten Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Jumlah volume sampah perkotaan}} \times 100\%$								
17.	Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %)	Capaian Poin Demokrasi Katori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI/ KRITERIA DEMOKRASI</th> <th>INDEKS KOMPOSIT</th> <th>POIN</th> <th>VARIABEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDI (DEMOKRASI YANG BAIK</td> <td>Kebebasan Sipil</td> <td>10 10 10</td> <td>Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI/ KRITERIA DEMOKRASI	INDEKS KOMPOSIT	POIN	VARIABEL	IDI (DEMOKRASI YANG BAIK	Kebebasan Sipil	10 10 10	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat
KATEGORI/ KRITERIA DEMOKRASI	INDEKS KOMPOSIT	POIN	VARIABEL								
IDI (DEMOKRASI YANG BAIK	Kebebasan Sipil	10 10 10	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat								

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
			DAN BERKUALITAS)		100		Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi
				Hak-Hak Politik		10 10 10	Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
				Institusi Demokrasi		10 10 10 10	Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen
			POIN INTERVAL	KATEGORI PERSEPSI	ASPEK DEMOKRASI		
			80 - 100	BAIK BERKUALITAS	Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik		
			60 - 79	CUKUP	Institusi		
			50-59	KURANG BAIK	Demokrasi		

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
18.	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan daerah Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<p>Alasan Pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Cakupan yan trantibum, penegakan Perda, linmas dan koordinasi kebakaran}}{4} \times 1$</p>
19.	Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai)	Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.	
20.	Angka Kriminalitas (Satuan: jumlah)	Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi)	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur tingkat kriminalitas di Provinsi Banten</p> $= \frac{\Sigma \text{Tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\Sigma \text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$
21.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Satuan: Nilai)	IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik.” “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama	$kn = \frac{Wun}{Wsn} \times 100$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koefisien Indikator Utama ke-n - Bobot Indikator Utama ke-n - Bobot Sub Indikator dari Indikator Utama ke-n

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		<p>pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. Indikator Utama tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tenaga kerja; 2. Penduduk dan tenaga kerja; 3. Kesempatan kerja; 4. Pelatihan kerja; 5. Produktivitas tenaga kerja; 6. Hubungan Industrial; 7. Kondisi lingkungan kerja; 8. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja; 9. Jaminan sosial tenaga kerja. 	
22.	Indeks pembangunan gender (IPG) (Satuan: Nilai)	Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per	$= \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		kapita/pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan)	
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Satuan: Nilai)	Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan	$IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis))$
24.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %)	Kemampuan Daerah untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakatnya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari	$IKPRT = 100 - (H (G+(1-G) I) + 0,5 Q (1-H (G + (1-G) I)) 100$ <p>dimana: IKPRT = Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga H = <i>head-count ratio</i>, proporsi penduduk yang kekurangan pangan G = <i>food-gaps</i>, proporsi kekurangan energi/protein dengan kebutuhannya = ukuran ketimpangan dari distribusi <i>food-gaps</i> Q = koefisien variasi dari ketersediaan untuk konsumsi energi/protein</p>
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan: %)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang	$IKLH\ Provinsi = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>Keterangan: IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat Provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		mencakup udara, air, dan hutan.	ITH = indeks tutupan hutan
26.	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (Satuan: %)	Angka yang menunjukkan kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu	Angka Rata-Rata kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu
27.	Persentase Desa Mandiri (Satuan: %)	Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk melihat tingkat perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, IPD dimaksudkan sebagai instrumen: (a) perencanaan pembangunan desa di Indonesia; (b) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa; dan (c) pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional	<p>a. Penghitungan bobot tiap indicator dalam faktor dengan formula:</p> $B = \frac{LF}{\sum RSSL} \times RLF$ <p>Keterangan: <i>B</i> = nilai bobot, <i>LF</i> = nilai <i>loading factor</i>, <i>RLF</i> = rata-rata <i>loading factor</i> dalam satu faktor, <i>RSSL</i> = nilai <i>rotation sum of squared loading (% of variance)</i>.</p> <p>b. Penghitungan kontribusi tiap indikator dengan formula:</p> $b = \frac{B}{JB}$ <p>Keterangan:</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		<p>tahun 2015–2019 di Indonesia.</p> <p>Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.</p>	<p>b = nilai kontribusi, B = nilai bobot, JB = jumlah semua bobot.</p>
28.	Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: Nilai)	Angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right\} \times 100$ <p>r = laju pertumbuhan penduduk P_t = Jumlah penduduk pada tahun t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun P_t dengan P_0</p> $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ <p>P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t M_o = Jumlah migrasi</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			keluar selama periode 0 - t M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t 8
29.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan: %)	Perhitungan terhadap penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	<p>Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah kecelakaan tahun } n}{\text{Jumlah kecelakaan tahun } n - 1} \times 100\%$
30.	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (Satuan: %)	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan kewenangan Provinsi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi..</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$
31.	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)	E-Government (e-Gov) merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi dapat menggunakan pelayanan secara elektronik.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\sum \text{Masyarakat yang terlayani e-Gov}}{\text{Permohonan Pelayanan e-Gov}} \times 100\%$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.	
32.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: %)	Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih perlunya peningkatan keterbukaan informasi publik dari perangkat daerah di Provinsi Banten.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang membuka akses atas informasi publik}}{\text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$
33.	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi (Satuan: %)	Peningkatan persentasi koperasi aktif, Bankable, dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina	<p>persentasi koperasi aktif, Bankable, dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina</p> $\frac{\text{Koperasi aktif, Bankable, dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi}}{\text{Jumlah koperasi yang di bina}}$
34.	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil (Satuan: %)	Persentase Peningkatan Omset, asset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina	<p>Persentase Omset, asset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina</p> $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi usaha menengah}}{\text{Jumlah Usaha kecil yang di bina}}$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
35.	Jumlah Nilai Investasi (Satuan: triliun)	Jumlah realisasi PMDN dan realisasi PMA. Tujuannya untuk menghitung realisasi penanaman modal (PMDN + PMA).	Rumus Perhitungan: Jumlah Realiasi PMA+ Realisasi PMDN
36.	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor (Satuan: %)	Penilaian atas kualitas layanan DPMPTSP dari aspek publik yang menggunakan layanannya. Tujuannya untuk melihat tingkat kualitas layanan DPMPTSP kepada publik, semakin tinggi nilai IKM, semakin baik, artinya semakin banyak masyarakat yang merasakan profesionalitas DPMPTSP	Rumus Perhitungan: $= \frac{\Sigma \text{Jumlah masyarakat yang menilai kinerja DPMPTSP baik}}{\Sigma \text{masyarakat yang menggunakan layanan DPMPTSP}} \times 100$
37.	Indeks Pembangunan Kepemudaan (Satuan: Nilai)	Untuk mengidentifikasi dalam pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah potensi dalam pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan. $\text{Pemuda mandiri} = \frac{\text{Pemuda yang berkarakter Produktif}}{\text{Pemuda yang berdaya saing}}$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
38.	Indeks Pembangunan Olahraga (Satuan: Nilai)	Untuk mengidentifikasi dalam peningkatan olahraga prestasi, pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan olahraga.	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah atlet berprestasi pada tingkat nasional dan internasional</p> $Prestasi (Olahraga Prestasi) = \frac{\text{Siswa Berolahraga (Olahraga Pendidikan)}}{\text{Olahraga Masyarakat (Pemasalan dan Pembudayaan)}}$
39.	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (Satuan: %)	mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten	<p>Alasan pemilihan indikator: mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten</p> $\frac{\Sigma \text{inovasi budaya yang dilestarikan}}{\Sigma \text{budaya daerah yang ada}}$
40.	Persentase peningkatan minat baca masyarakat (Satuan: %)	Meningkatnya sikap positif dan ketertarikan masyarakat terhadap aktifitas membaca melalui indikator : frekuensi membaca per minggu, lama membaca perhari, dan banyak buku yang ditamatkan dalam 1 (satu) tahun.	<p>Minat baca = $\frac{\Sigma \text{rata2 tiap indikator minat baca}}{3}$</p> <p>Skoring minat baca:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat rendah (skor ≤ 20) Rendah (skor 20,1 – 40) Sedang (skor 40,1 – 60) Tinggi (skor 60,1 – 80) Sangat tinggi (skor 80,1 – 100)

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
41.	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan (Satuan: %)	Tersedianya <i>record centre</i> di Perangkat Daerah Provinsi Banten	$\% \text{ Perangkat Daerah} = \frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang memiliki record center}}{\sum \text{Total Perangkat Daerah}} \times 100$
42.	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan: %)	Proses kenaikan <i>output</i> perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun	<p>Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007):</p> $G = \frac{\text{PDRB}_1 - \text{PDRB}_0}{\text{PDRB}_0} \times 100\%$ <p>G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya</p>
43.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Satuan: %)	Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam hal ini adalah sektor akomodasi makan dan minum baik dalam PDRB ADHK.	(Kontribusi sektor akomodasi makan dan minum dalam PDRB ADHK tahun n) dikurangi (Kontribusi sektor akomodasi makan dan minum PDRB ADHK tahun n-1) di bagi (PDRB Kontribusi sektor akomodasi makan dan minum ADHK tahun n-1)

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		<p>Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan kontribusi sektor akomodasi makan dan minum pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun peningkata LPE sektor pariwisata (akomodasi makan dan minum ini) tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja sektor ini sesungguhnya, sebab peningkatan kontribusi dapat disebabkan oleh kinerja sektor akomodasi makan dan minum yang meningkat atau sektor diluar sektor akomodasi makan dan minum kontribusinya yang menurun. Sehingga untuk membuktikan kinerja sektor pariwisata yang meningkat perlu didukung oleh indikator kinerja kunci seperti jumlah kunjungan wisatawan</p>	

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
43.	Pertumbuhan Sektor Pertanian (Satuan: %)	Proses kenaikan <i>output</i> perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun	<p>Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007):</p> $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ <p>G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya</p>
44.	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan: %)	Perbandingan Luas Kawasan Hutan ditambah dengan Tutupan Hutan diluar Kawasan Hutan yang memiliki kerapatan (vegetasi) diatas 50% dibagi Luas Provinsi Banten	$\text{Rasio Tutupan Hutan} = \frac{KH + TH \text{ diluar KH}}{\text{Luas Provinsi}} + x 100\%$ <p>Keterangan: KH = Kawasan Hutan TH = Tutupan Hutan Catatan: 1. Identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode/Teknik NDVI (<i>Normalized Difference Vegetation Index</i>) dari Citra Landsat 8 Tahun 2016 2. Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS/Banten dalam angka</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
45.	Rasio elektrifikasi (Satuan: %)	Rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau Negara	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Banten yang telah terlayani aliran listrik.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\Sigma \text{penduduk yang telah mendapat listrik}}{\Sigma \text{Penduduk Provinsi Banten}} \times 100\%$
46.	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (Satuan: %)	Perhitungan terhadap pertumbuhan sektor-sektor di bidang sumber daya mineral.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah PDRB dibidang SDM tahun } n}{\text{Jumlah PDRB dibidang SDM tahun } n - 1} \times 100\%$
47.	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan: %)	Tingkat inflasi menunjukkan persentase tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang pokok (beras, rokok, gula, jagung kedelai, minyak goreng, daging beku, bawang merah) dan bahan galian strategis (aspalt, bijih besi, minyak bumi, dan bahan tambang) < Bregman EM , Feses EJ . 2003>	<p>Tingkat inflasi</p> $\text{Laju Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_0}{IHK_0} \times 100\%$ <p>Keterangan: IHK_n = Indeks Harga Konsumen pada tahun n IHK₀ = Indeks Harga Konsumen pada tahun 0</p>

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																
48.	LPE Sektor Perdagangan (Satuan: %)	Menunjukkan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. <David, FR. 2014. Strategi Management >	<p>LPE sektor perdagangan</p> $Gi = \frac{PDRB_{i1} - PDRB_{i0}}{PDRB_{i0}} \times 100\%$ <p>Keterangan : G = adalah tingkat pertumbuhan sektor Perdagangan yang dinyatakan dalam persen. PDRB _i = PDRB Sektor Perdagangan pada tahun t PDRB ₀ = pendapatan daerah pada tahun dasar.</p>																
49.	Capaian Pelayanan Publik (Satuan: %)	Kepuasan pelayanan badan penghubung sebagai wakil dari Pemerintah Daerah terhadap lembaga dan masyarakat,	<p>1) Indikator: jumlah lembaga yang dilayani dibagi jumlah lembaga:</p> $= \frac{\Sigma \text{lembaga yang dilayani}}{\Sigma \text{lembaga}} \times 100\%$ <p>2) Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang)</p> <table border="1" data-bbox="1148 894 1938 1198"> <thead> <tr> <th data-bbox="1148 894 1315 1045">Nilai Persepsi</th> <th data-bbox="1315 894 1555 1045">Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)</th> <th data-bbox="1555 894 1746 1045">Mutu Pelayanan</th> <th data-bbox="1746 894 1938 1045">Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1148 1045 1315 1122">1</td> <td data-bbox="1315 1045 1555 1122">>1000</td> <td data-bbox="1555 1045 1746 1122">A</td> <td data-bbox="1746 1045 1938 1122">Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 1122 1315 1198">2</td> <td data-bbox="1315 1122 1555 1198">501-999</td> <td data-bbox="1555 1122 1746 1198">B</td> <td data-bbox="1746 1122 1938 1198">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 1198 1315 1274">3</td> <td data-bbox="1315 1198 1555 1274"><500</td> <td data-bbox="1555 1198 1746 1274">C</td> <td data-bbox="1746 1198 1938 1274">Cukup</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	>1000	A	Sangat Baik	2	501-999	B	Baik	3	<500	C	Cukup
Nilai Persepsi	Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																
1	>1000	A	Sangat Baik																
2	501-999	B	Baik																
3	<500	C	Cukup																

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
50.	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN			
			KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	
			1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
			2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
			3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
			4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
			5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya
			TOTAL		100	
51.	Capaian Program-program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD	Capaian Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD pada tahun berkenaan	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah $\frac{\text{Capaian program kerja DPRD yang dilaksanakan}}{\text{Target program kerja DPRD yang ditetapkan}} \times 100$			

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan															
	maupun Dokumen RKPD (Satuan: %)																	
52.	Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)	Untuk menentukan kualitas dalam konteks maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1146 586 1435 626">Level</th> <th data-bbox="1435 586 2287 626">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1146 626 1435 699">1 (belum ada)</td> <td data-bbox="1435 626 2287 699">Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 699 1435 813">2 (Rintisan)</td> <td data-bbox="1435 699 2287 813">Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 813 1435 894">3 (Berkembang)</td> <td data-bbox="1435 813 2287 894">Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 894 1435 967">4 (Terdefinisi)</td> <td data-bbox="1435 894 2287 967">Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 967 1435 1040">5 (Terkelola dan Terukur)</td> <td data-bbox="1435 967 2287 1040">Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 1040 1435 1159">6 (Optimum)</td> <td data-bbox="1435 1040 2287 1159">Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis</td> </tr> </tbody> </table>		Level	Keterangan	1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal	2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan	3 (Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya	4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai	5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi	6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis
Level	Keterangan																	
1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal																	
2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan																	
3 (Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya																	
4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai																	
5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi																	
6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis																	
53.	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: Peringkat)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan (RKPD) dengan parameter penilaian Pangripta	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan daerah yang disusun}}{\sum \text{dokumen perencanaan yang sesuai dgn parameter penilaian Pangripta}} \times 100$															

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan										
54.	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %)	Capaian Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan daerah	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah</p> $= \frac{\Sigma \text{pendapatan asli daerah}}{\Sigma \text{pendapatan daerah}} \times 100$										
55.	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (Satuan: Opini)	merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1148 561 1273 597">Level</th> <th data-bbox="1273 561 2332 597">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1148 597 1273 675">1</td> <td data-bbox="1273 597 2332 675">Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 675 1273 753">2</td> <td data-bbox="1273 675 2332 753">Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 753 1273 831">3</td> <td data-bbox="1273 753 2332 831">Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 831 1273 909">4</td> <td data-bbox="1273 831 2332 909">Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)</td> </tr> </tbody> </table>	Level	Keterangan	1	Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)	2	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)	3	Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)	4	Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)
Level	Keterangan												
1	Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)												
2	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)												
3	Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)												
4	Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)												
56.	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (Satuan: %)	Pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN Pemerintah Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian kinerja yang berkategori baik ASN pada setiap bulan	$\text{Indeks Profesionalisme} = \frac{\text{Jumlah ASN yang berkinerja dan berdisiplin baik}}{\text{Jumlah ASN Provinsi Banten}} \times 100$										

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		diimbangi/sinergi dengan ketentuan terhadap peraturan yang berlaku	
57.	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan: Nilai)	Kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek <i>skill</i> , <i>knowledge</i> dan <i>attitude</i> yang dibuktikan dari sertifikat kelulusan mengikuti kegiatan Pengembangan SDM Aparatur (kegiatan pendidikan dan pelatihan)	Indeks Kompetensi = $\frac{\text{Jumlah peserta Diklat Dengan Kategori Lulus}}{\text{Jumlah ASN Provinsi Banten}} \times 100$
58.	Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %)	Capaian penelitian yang dihasilkan dan dimanfaatkan	Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka <i>evidence based policy</i> $\frac{\Sigma \text{Hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{Hasil penelitian yang dilaksanakan}} \times 100$

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERANGKAT DAERAH PROVINSI
 BANTEN TAHUN 2017-2022

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN			
				KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya
					TOTAL	100	

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		2. Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
		3. Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	<p>Adapun rumus untuk penghitungan HLS adalah sebagai berikut:</p> $HLS_7 = \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i}$ <p>Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah P_i = Jumlah seluruh penduduk usia i i = Usia (7, 8, ..., n)</p>
		4. Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah		<p>Alasan pemilihan indikator: mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten</p> $\frac{\Sigma \text{inovasi budaya yang dilestarikan}}{\Sigma \text{budaya daerah yang ada}}$
		Indikator Kinerja Program (esselon III)		

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah menengah	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang sekolah menengah (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.	$APK_{th} = \frac{E t h}{P t h a} \times 100$ Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E t h = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h Ph,a t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h																									
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah menengah	Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah di Sekolah Menengah terhadap penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun.	$APM_{th} = \frac{E t h a}{P t h a} \times 100$ dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E h, a t = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t Ph,a t = jumlah penduduk kelompok usia a																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		4. Angka Putus Sekolah SMA	Proporsi penduduk usia sekolah menengah yang tidak bersekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah yang bersekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada jenjang SMA</p> $APS\ SMA = \frac{\Sigma\text{capaian kinerja APS SMA se Kab dan Kota}}{\Sigma\text{seluruh APS SMA se Kab dan Kota}} \times 100$
		5. Angka Putus Sekolah SMK	Proporsi penduduk usia sekolah menengah yang tidak bersekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah yang bersekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada jenjang SMK</p> $APS\ SMK = \frac{\Sigma\text{capaian kinerja APS SMA se Kab dan Kota}}{\Sigma\text{seluruh APS SMA se Kab dan Kota}} \times 100$
		6. Angka kelulusan SMA	Proporsi kelulusan siswa SMA pada Ujian Nasional	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur pencapaian peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan tersebut.</p> $AKL\ SMA = \frac{\Sigma\text{kelulusan pada jenjang SMA}}{\Sigma\text{siswa tingkat tertinggi jenjang SMA pd thn sebelumnya}} \times 100$
		7. Angka kelulusan SMK	Proporsi kelulusan siswa SMK pada Ujian Nasional	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur pencapaian peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan tersebut.</p> $AKL\ SMK = \frac{\Sigma\text{kelulusan pada jenjang SMA}}{\Sigma\text{siswa tingkat tertinggi jenjang SMA pd thn sebelumnya}} \times 100$
		8. Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA	Nilai rata-rata Ujian dibandingkan mata pelajaran yang diberikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	$\text{Rata-rata} = \frac{\Sigma\text{Nilai Ujian}}{\Sigma\text{Mata Pelajarab}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		9. Nilai Rata-rata Ujian SMK	Nilai rata-rata Ujian dibandingkan mata pelajaran yang diberikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	$\text{Rata-rata} = \frac{\sum \text{Nilai Ujian}}{\sum \text{Mata Pelajarab}} \times 100$
		10. Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS	Nilai rata-rata Ujian dibandingkan mata pelajaran yang diberikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	$\text{Rata-rata} = \frac{\sum \text{Nilai Ujian}}{\sum \text{Mata Pelajarab}} \times 100$
		11. Persentase SMK yang menerapkan link and match	Perbandingan SMK yang menerapkan pengembangan untuk meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha serta dunia industri khususnya	$= \frac{\sum \text{SMK yang menerapkan link and mastch}}{\sum \text{Total SMK}} \times 100$
		12. Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus	1. Perbandingan antara jumlah anak berkebutuhan khusus yang masih bersekolah (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun.	$\text{APK}^{\text{th}} =$ <p>Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E t h = adalah jumlah anak berkebutuhan khusus yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h Ph,a t = adalah jumlah anak berkebutuhan khusus yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>2. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Yang Sudah Terlayani Pendidikannya</p> <p>3. Cakupan Pembinaan Terhadap Sekolah Khusus dan Layanan Khusus</p>	<p>$= \frac{\sum \text{siswa sekolah khusus (Pendidikan Khusus)} + \sum \text{siswa Sekolah Inklusif (Pendidikan Layanan Khusus)}}{\sum \text{Populasi Anak Usia Sekolah yang berkebutuhan khusus}}$</p> <p>Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur Ketercapaian Pelayanan Pendidikan di Sekolah Khusus dan Layanan Khusus di Provinsi Banten.</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\sum \text{Sekolah Khusus dan Layanan Khusus yang dibina}}{\sum \text{Sekolah Khusus dan Layanan Khusus yang dipetakan (Existing)}}$</p>
		13. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK	Mengukur profesionalisme guru SMK secara akademis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuannya untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi professional; 2. UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan professional; 3. Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru.
		14. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA	Mengukur profesionalisme guru SMA secara akademis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuannya untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi professional; 2. UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan professional; 3. Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru.
		15. Persentase guru SMA yang bersertifikat	Proporsi guru SMA yang telah lulus ujian sertifikasi dibandingkan jumlah total guru	$= \frac{\sum \text{Guru SMA yang lulus Sertifikasi}}{\sum \text{Total guru}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		16. Persentase guru SMK yang bersertifikat	Proporsi guru SMK yang telah lulus ujian sertifikasi dibandingkan jumlah total guru	$= \frac{\Sigma \text{Guru SMK yang lulus Sertifikasi}}{\Sigma \text{Total guru}} \times 100$
		17. Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran	Proporsi akses dan mutu media pembelajaran	$= \frac{\Sigma \text{Sekolah yang memiliki akses dan meningkatkan mutu media pembelajaran}}{\Sigma \text{Total sekolah}} \times 100$
		18. Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten	Jumlah event budaya yang dipentaskan	Alasan pemilihan indikator: mengukur keberlanjutan pelestarian event budaya di Provinsi Banten $\frac{\Sigma \text{event budaya yang dipentaskan}}{\Sigma \text{event budaya hasil pelestarian}}$
		19. Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya)	Cakupan pembinaan terhadap organisasi kesenian seperti : Sanggar Seni di Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SKh), Dewan Kesenian Banten (DKB), Komunitas Seni yang dibina oleh Perguruan Tinggi (PT)/SKPD/Lembaga Pemerintah, dan Sanggar Seni yang dikelola oleh Masyarakat.	Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pembinaan organisasi kesenian di Provinsi Banten. $\text{Indeks Cakupan (IC)} = \frac{\Sigma \text{organisasi kesenian yang dibina}}{\Sigma \text{organisasi kesenian yang dipetakan}}$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		20. Cakupan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya	Tingkat cakupan fasilitasi dan apresiasi seni di Sanggar Seni di Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SKh), Dewan Kesenian Banten (DKB), Komunitas Seni di PT/SKPD/Lembaga Pemerintah, dan Sanggar Seni yang dikelola oleh Masyarakat.	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan apresiasi dan kreatifitas karya budaya di Provinsi Banten.</p> <p>Indeks Cakupan Apresiasi (ICA) = $\frac{\Sigma \text{karya budaya yang diapresiasi}}{\Sigma \text{karya budaya yang dipetakan}}$</p>
		21. Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya	Tingkat cakupan pelestarian nilai-nilai sejarah dan warisan budaya di Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SKh), Komunitas Sejarah dan Budaya di lingkungan PT, dan Komunitas Sejarah dan Budaya di Masyarakat.	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pelestarian nilai-nilai sejarah dan warisan budaya di Provinsi Banten.</p> <p>Indeks Pelestarian Warisan Budaya (IPW) = $\frac{\Sigma \text{Warisan Budaya yang dilestarikan}}{\Sigma \text{Warisan Budaya yang dipetakan}}$</p>
		22. Cakupan Pelayanan Museum	<p>1. Tingkat pemenuhan sarana/ prasarana dan koleksi museum.</p> <p>2. Prosentase pengunjung museum</p>	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat pemenuhan sarana/prasaran dan koleksi museum di Provinsi Banten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Prasarana Museum (IPM) = $\frac{\Sigma \text{Sarana dan Koleksi yang terpenuhi}}{\Sigma \text{Sarana dan Koleksi yang diperlukan}}$ • Indeks Pengunjung Museum (IP) = $\frac{\Sigma \text{Pengunjung Museum}}{\Sigma \text{Warga Potensi Pengunjung Museum}}$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		23. Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Tingkat cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan terhadap jumlah kawasan cagar budaya yang tercatat.	Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pelestarian kawasan cagar budaya (CB) di Provinsi Banten. Indeks Pelestarian Kawasan CB (IPKCB) = $\frac{\Sigma \text{Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\Sigma \text{Cagar Budaya yang tercatat}}$
		24. Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya	Tingkat cakupan benda cagar budaya yang dilestarikan terhadap jumlah benda cagar budaya yang tercatat.	Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pelestarian benda cagar budaya (CB) di Provinsi Banten. Indeks Pelestarian Benda CB (IPBCB) = $\frac{\Sigma \text{Benda Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\Sigma \text{Benda Cagar Budaya yang tercatat}}$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
2.	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th></th> <th>KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> Dan <i>Outcome</i> Dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN					KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> Dan <i>Outcome</i> Dan Kinerja Lainnya		TOTAL	100	
ASPEK PENILAIAN																																				
	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> Dan <i>Outcome</i> Dan Kinerja Lainnya																																	
	TOTAL	100																																		
		2. Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur																																
		3. Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Dimana: $D0-\leq 1th$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. \sum Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	$AKB = \frac{D0-\leq 1th}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																				
		4. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Ibu yang meninggal pada masa kehamilan, bersalin dan nifas bukan karena kecelakaan atau sakit di wilayah tertentu selama satu tahun	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar</p> $= \frac{\Sigma \text{ibu yang meninggal krn hamil, bersalin, nifas di suatu wilayah ttt selama 1 thn}}{\Sigma \text{kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100$																				
		5. Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam rangka UHC (<i>Universal Health Coverage</i>).	<p>Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan</p> $= \frac{\Sigma \text{penduduk yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan}}{\Sigma \text{total penduduk Banten}} \times 100$																				
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																						
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	<p>IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 –</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 –	B	Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																				
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																				
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																				
3	2,51 – 3,25	62,51 –	B	Baik																				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																		
				<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>81,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26</td> <td>-</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			81,25				4	3,26 – 4,00	81,26	-	A	Sangat Baik			100			
		81,25																				
4	3,26 – 4,00	81,26	-	A	Sangat Baik																	
		100																				
		2. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Perbandingan Jumlah Persalinan yang ditolong di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan total persalinan	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar</p> $= \frac{\Sigma \text{persalinan yang ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan}}{\Sigma \text{total persalinan}} \times 100$																		
		3. Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani dibandingkan seluruh kasus gizi buruk	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengevaluasi kualitas pelayanan terhadap gizi buruk</p> $= \frac{\Sigma \text{balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani}}{\Sigma \text{seluruh kasus gizi buruk}} \times 100$																		
		4. Persentase Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat	Capaian Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program kesehatan masyarakat (Preventif dan Promotif)</p> $= \frac{\Sigma \text{kab kota yang mencapai target indikator kesehatan masyarakat}}{\Sigma \text{total Kab Kota}} \times 100$																		

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		5. Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam rangka UHC (<i>Universal Health Coverage</i>).	Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan $= \frac{\Sigma \text{penduduk yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan}}{\Sigma \text{total penduduk Banten}} \times 100$
		6. Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKTL, Laboratorium)	Capaian pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Alasan pemilihan indikator: untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan $= \frac{\Sigma \text{sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi}}{\Sigma \text{total jumlah sarana pelayanan kesehatan}} \times 100$
		7. Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat	Capaian pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat. $= \frac{\Sigma \text{tahapan pembangunan yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{target dalam satu tahun}} \times 100$
		8. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan:%)	Capaian pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan. $= \frac{\Sigma \text{tahapan pembangunan yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{target dalam satu tahun}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		9. Persentase Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan	Capaian Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan.</p> $\frac{\Sigma \text{ kab kota yang mencapai target indikator P2P}}{\Sigma \text{ total Kab Kota}} \times 100$
		10. Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang di Rekrut dan di tingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut, ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan di daerah terpencil	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.</p> <p>Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut</p>
		11. Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Untuk menghitung Rasio Pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan	<p>Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang pelayanan kesehatan. Rasio Pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan</p> $= \frac{\Sigma \text{ pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan}}{\Sigma \text{ target dalam satu tahun}} \times 100$
		12. Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian	Capaian Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dibandingkan jumlah sarana kefarmasian yang ada	<p>Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang pelayanan kefarmasian.</p> $= \frac{\Sigma \text{ sarana kefarmasian yang dibina}}{\Sigma \text{ sarana kefarmasian}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		13. Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani	Capaian Jenis Pemeriksaan pelayanan Laboratorium yang dilaksanakan dibandingkan dengan seluruh jenis pemeriksaan	Alasan pemilihan indikator: untuk meningkatkan fungsi pelayanan di Laboratorium kesehatan. $= \frac{\Sigma \text{ jenis pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ total jumlah jenis pemeriksaan}} \times 100$
		14. Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM	Capaian Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di wilayah kerja BKKM dibandingkan seluruh Perusahaan di wilayah kerja BKKM	Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan kerja BKKM $= \frac{\Sigma \text{ perusahaan yang mendapat pelayanan kesehatan kerja}}{\Sigma \text{ total jumlah perusahaan wilayah kerja BKKM}} \times 100$
		15. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (satuan :%)	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Medis RSUD Banten yang terpenuhi	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian penunjang pelayanan medis di RSUD Banten. $= \frac{\Sigma \text{ SPM Pelayanan Medis RSUD Banten yang terpenuhi}}{\Sigma \text{ Standar SPM Pelayanan Medis}} \times 100$
		16. Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (satuan :%)	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Keperawatan RSUD Banten yang terpenuhi	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian penunjang pelayanan keperawatan di RSUD Banten. $= \frac{\Sigma \text{ SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten yang terpenuhi}}{\Sigma \text{ Standar SPM Pelayanan Keperawatan}} \times 100$
		17. Capaian pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten (Satuan:%)	Capaian Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar	Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui capaian pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten $= \frac{\Sigma \text{ sarana prasarana yang terpenuhi}}{\Sigma \text{ jumlah standar sarana prasarana Rumah Sakit}} \times 100$
		18. <i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i> RSUD Malingping	Capaian <i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i> RSUD Malingping	Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui daya tampung pasien di ruang perawatan RSUD Malingping. Formulasi Pengukuran : <i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i> Rata-rata jumlah pasien keluar * jumlah kapasitas tempat tidur * 100%. Angka yang menunjukkan presentase tempat tidur yg digunakan dalam satu tahun, BOR ideal = 75-85 %
		19. Indeks kepuasan	Pernyataan Puas oleh	Pernyataan Puas oleh pelanggan kepada rumah sakit sesuai standar pelayanan

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		pelanggan RSUD Malingping	pelanggan kepada rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal, dilaksanakan melalui survey	minimal, dilaksanakan melalui survey
		20. Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM RSUD Malingping (Satuan:%)	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSUD Malingping yang terpenuhi	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian Standar pelayanan Minimal di RSUD Malingping. $= \frac{\Sigma SPM \text{ Pelayanan yang terpenuhi}}{\Sigma \text{ StandarSPM}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja yang dilaporkan, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kinerja lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja yang dilaporkan, <i>output</i> , <i>outcome</i> dan kinerja lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja yang dilaporkan, <i>output</i> , <i>outcome</i> dan kinerja lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Tingkat Kemantapan Jalan	<p>Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu).</p> <p>Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penilikan Jalan</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan 																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		3. Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiap siagaan satgas siaga banjir Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Air Rusak	Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area yang telah ditangani}}{\text{Luas area rawan bencana}} \times 100\%$
		4. Pemenuhan tingkat layanan irigasi	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area irigasi yang terlayani}}{\text{Total luas area irigasi}} \times 100\%$
		5. Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	Prosentase kesesuaian ruang terhadap pelaksanaan pembangunan	Alasan Pemilihan Indikator: dalam mendukung dan mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, pengendalian ini efektif apabila 4 aspek pengendalian terpenuhi indikator yaitu Penetapan zonasi, pemberian insetif dan disinsentif, perijinan dan penegakan sanksi Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana peruntukan ruang}}{\text{Luas lahan peruntukan}} \times 100\%$
		Indikator Kinerja Program (esselon III)		

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Jalan	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan 																									
		3. Persentase Jalan Provinsi yang Belum Memenuhi Standar Teknis	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi yang sudah memenuhi standar atau	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi ruas jalan dapat berfungsi optimal dan memenuhi SPM jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan. Formulasi Pengukuran:																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		(Satuan: %)	persyaratan teknis. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan yang belum memenuhi standar}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$
		4. Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	Persentase dari jumlah jembatan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jumlah jembatan provinsi}} \times 100\%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan
		5. Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	Persentase dari tersusunnya Peraturan Daerah tentang RDTR pada 8 Kawasan Strategis Provinsi Banten	Alasan Pemilihan Indikator: Dalam mewujudkan pembangunan sektoral pada kawasan strategis Provinsi yang terintegrasi di Provinsi Banten diperlukan rencana tata ruang yang baik. Untuk 5 Tahun direncanakan disusun 8 Peraturan Daerah pada 8 kawasan strategis Provinsi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Perda RTR KSP}}{8} \times 100\%$
		6. Persentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Provinsi Banten yang memenuhi standar yang berlaku (K3, standar kompetensi kerja, standar remunerasi minimal,	Alasan Pemilihan Indikator: Dalam mewujudkan pelaksanaan jasa konstruksi yang baik, diperlukan badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar dan mampu bersaing dengan BUJK dari wilayah lain. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah BUJK yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah BUJK di Provinsi Banten}} \times 100\%$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			mutu material dan peralatan, dll) Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi	
		7. Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana	Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area yang telah ditangani}}{\text{Luas area rawan bencana}} \times 100\%$
		8. Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar)	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area irigasi yang terlayani}}{\text{Total luas area irigasi}} \times 100\%$
		9. Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	Cakupan panjang pantai dalam kondisi baik. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur panjang pantai kondisi rusak yang telah ditangani. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Panjang pantai kondisi baik}}{\text{Total panjang pantai}} \times 100\%$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Persentase Rumah Layak Huni	Cakupan rumah layak huni di Provinsi Banten.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tidak layak huni di Provinsi Banten (tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni).</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$																																
		3. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Cakupan luas penataan kawasan kumuh	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur luas kawasan kumuh di Provinsi Banten</p> $= \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$																																
		4. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan	Alasan Pemilihan Indikator: Masih belum terkelolanya penanganan sampah perkotaan di Provinsi Banten																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
				Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Jumlah volume sampah perkotaan}} \times 100\%$																									
		5. Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah gedung strategis yang telah dikelola dengan baik}}{\text{Jumlah gedung strategis}} \times 100\%$																									
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																									
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		2. Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Cakupan luas penataan kawasan kumuh. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Alasan Pemilihan Indikator: dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat dibutuhkan penataan/peningkatan kualitas kawasan kumuh. Formulasi Perhitungan: Jumlah luas kawasan kumuh yang telah ditata dari total luas kawasan kumuh.
		3. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Cakupan penanganan rumah tidak layak huni. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tidak layak huni di Provinsi Banten (tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni). Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani}}{\text{Total jumlah rumah tidak layak huni}} \times 100\%$
		4. Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah gedung strategis yang telah dikelola dengan baik}}{\text{Jumlah bangunan strategis}} \times 100\%$
		5. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di 8 (delapan) kawasan strategis Provinsi.	Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki 8 (delapan) kawasan strategis Provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Banten. Perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di 8 kawasan tersebut. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kawasan strategis yang telah dilakukan PBL}}{\text{Jumlah kawasan strategis}} \times 100\%$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		6. Cakupan Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Cakupan pelayanan air bersih dalam rangka menjamin rumah tangga atas akses air bersih.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang terlayani, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses air bersih.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
		7. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	Cakupan pelayanan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi, dalam rangka menjamin hak masyarakat sanitasi lingkungan dan memenuhi target 100-0-100.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang belum terlayani akses sanitasi lingkungan layak, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses sanitasi lingkungan layak.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
		8. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih belum terkelolanya penanganan sampah perkotaan di Provinsi Banten</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Jumlah volume sampah perkotaan}} \times 100\%$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																												
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																														
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<p style="text-align: center;">ASPEK PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya		TOTAL	100	
	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN																													
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																													
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																													
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																													
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																													
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																													
	TOTAL	100																														
		2. Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan Daerah Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<p>Alasan Pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturanperundang-undangan tingkat Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Cakupan yan trantibum, penegakan Perda, linmas dan koordinasi kebakaran}}{4} \times 100$</p>																												
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																														
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																												

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			dasar 25	IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																									
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Daerah Provinsi	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum $\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$																									
		3. Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan Provinsi	Alasan pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi $\frac{\sum \text{Penegakan peraturan perundangan} - \text{undangan}}{\sum \text{Pelanggaran peraturan perundangan} - \text{undangan}} \times 100$																									
		4. Cakupan perlindungan masyarakat	Prosentase penanganan perlindungan masyarakat	Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja penanganan perlindungan masyarakat $\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{1 \text{ wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100$																									
		5. Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Prosentase koordinasi penanganan bencana kebakaran	Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pelayanan bencana kebakaran $\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
6.	Badan Penanggulangan Bencana	Indikator Kinerja Utama (eselon II)					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN			
				KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya
					TOTAL	100	
		2. Indeks Risiko Bencana	Bahaya (<i>hazard</i>) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan <i>magnitude</i> dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (<i>vulnerability</i>) diamati berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter regulasi,	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$			

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan system kesiapsiagaan.																										
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1.Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																									
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2.Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Capaian prosentase relisasi pencegahan dan kesiapsiagaan yang direncanakan terhadap target direncanakan dalam pencegahan bencana	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui realisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> $= \frac{\sum \text{realisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana}}{\sum \text{target pencegahan bencana}} \times 100$																									
		3.Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana	Capaian prosentase realisasi ketersediaan peralatan logistic prabencana dan tanggap darurat yang dibutuhkan terhadap	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui realisasi ketersediaan peralatan dan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana</p> $= \frac{\sum \text{realisasi ketersediaan peralatan dan logistik}}{\sum \text{target pada saat bencana}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		dan Tanggapan Darurat Bencana	target yang direncanakan saat bencana terjadi	
		4. Presentase Pemulihan Kondisisosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	Capaian prosentase realisasi rehabilitasi Pemulihan kondisi social ekonomi sarana dan prasarana dan terhadap target yang direncanakan saat pasca bencana	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui realisasi rehabilitasi pemulihan kondisi sosial ekonomi dan sarana prasarana</p> $= \frac{\Sigma \text{realisasi rehabilitasi pemulihan kondisi sosial ekonomi}}{\Sigma \text{target pada saat bencana}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator Kinerja Utama (eselon II)					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN			
				KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya
					TOTAL	100	

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																														
		2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Capaian Poin Demokrasi Katori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI</th> <th>INDEKS KOMPOSIT</th> <th>POIN</th> <th>VARIABEL</th> <th>POIN IN TERVAL</th> <th>KATEGORI</th> <th>ASPEK DEMOKRASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS)</td> <td>Kebebasan Sipil</td> <td>10 10 10</td> <td>Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan dari Diskriminasi</td> <td rowspan="3">100</td> <td rowspan="3">80-100</td> <td rowspan="3">Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik</td> </tr> <tr> <td>Hak-Hak Politik</td> <td>10 10 10</td> <td>Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan</td> </tr> <tr> <td>Institusi Demokrasi</td> <td>10 10 10</td> <td>Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3. Angka Kriminalitas</td> <td>Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideology radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi)</td> <td> <p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur tingkat kriminalitas di Provinsi Banten</p> $= \frac{\sum \text{Tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\sum \text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$ </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">Indikator Kinerja Program (esselon III)</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI	INDEKS KOMPOSIT	POIN	VARIABEL	POIN IN TERVAL	KATEGORI	ASPEK DEMOKRASI	IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS)	Kebebasan Sipil	10 10 10	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan dari Diskriminasi	100	80-100	Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik	Hak-Hak Politik	10 10 10	Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	Institusi Demokrasi	10 10 10	Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen			3. Angka Kriminalitas	Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideology radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi)	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur tingkat kriminalitas di Provinsi Banten</p> $= \frac{\sum \text{Tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\sum \text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$			Indikator Kinerja Program (esselon III)		
KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI	INDEKS KOMPOSIT	POIN	VARIABEL	POIN IN TERVAL	KATEGORI	ASPEK DEMOKRASI																												
IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS)	Kebebasan Sipil	10 10 10	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan dari Diskriminasi	100	80-100	Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik																												
	Hak-Hak Politik	10 10 10	Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan																															
	Institusi Demokrasi	10 10 10	Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen																															
		3. Angka Kriminalitas	Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideology radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi)	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur tingkat kriminalitas di Provinsi Banten</p> $= \frac{\sum \text{Tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\sum \text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$																														
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Cakupan Pembinaan dan Penguatan 4 (empat) Konsesnus Dasar Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	Pembinaan terhadap Jumlah Kelompok Masyarakat Demokrasi: Sipil, Ormas, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur, Instansi Demokrasi dan Partai Politik melalui Penguatan Materi 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan.	$\frac{\sum \text{Jumlah yang mendapatkan pembinaan (4 Konsesnus Dasar)}}{\sum \text{Jumlah Kelompok Masyarakat Demokrasi}} \times 100$																									
		3. Angka Partisipasi Pilleg	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota yang memiliki Hak Memilih dan Hak Dipilih dalam Pileg Kabupaten/Kota dan Provinsi	$\frac{\sum \text{Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILEG}}{\sum \text{Jumlah Hak Memilih}} \times 100$																									
		4. Angka Partisipasi Pilgub	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se- Provinsi yang memiliki Hak	$\frac{\sum \text{Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILGUB}}{\sum \text{Jumlah Hak Memilih}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			Memilih dan Hak Dipilih dalam PILGUB	
		5. Angka Partisipasi Pilpres	Jumlah Penduduk Provinsi yang memiliki Hak Memilih dan Hak Dipilih dalam PILPRES	$\frac{\Sigma \text{Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILPRES}}{\Sigma \text{Jumlah Hak Memilih}} \times 100$
		6. Angka Partisipasi Pilkada Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota yang memiliki Hak Memilih dan Hak Dipilih dalam Pilkada Kabupaten/Kota.	$\frac{\Sigma \text{Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILKADA KAB/KOTA}}{\Sigma \text{Jumlah Hak Memilih}} \times 100$
		7. Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam Daerah	Penurunan gangguan keamanan di Provinsi Banten (ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi)	Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja mitigasi gangguan keamanan $\frac{\text{Gangguan keamanan periode saat ini}}{\text{Gangguan keamanan periode sebelumnya}}$
		8. Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah ormas Provinsi Banten yang mendapatkan pembinaan Konsensus Dasar Kebangsaan. (Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	$\frac{\Sigma \text{Jumlah yang mendapatkan pembinaan (4 Konsensus Dasar)}}{\Sigma \text{Jumlah Ormas Provinsi yang Terdaftar}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
8.	Dinas Sosial	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Index Gini	Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>																																
		3. Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Capaian PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial dibandingkan PMKS yang ada	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang direhabilitasi</p> $= \frac{\Sigma \text{PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial}}{\Sigma \text{PMKS}} \times 100$																									
		3. Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi sosialnya	Capaian PSKS yang mengalami peningkatan dalam berpartisipasi	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PSKS yang meningkat partisipasinya dibandingkan Jumlah PSKS</p> $= \frac{\Sigma \text{PSKS yang meningkat partisipasinya}}{\Sigma \text{PSKS}} \times 100$																									
		4. Cakupan <i>Updating Data</i> PMKS	Cakupan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Terintegrasi yang dikelola	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui cakupan data Kemiskinan, PMKS dan PSKS terintegrasi yang dikelola</p>																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		5. Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan	Capaian korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan dibandingkan korban bencana alam	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui korban bencana alam yang mendapat perlindungan $= \frac{\Sigma \text{korban bencana alam yang mendapat perlindungan}}{\Sigma \text{korban bencana alam}} \times 100$
		6. Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial	Capaian masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial dibandingkan total masyarakat miskin	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan sosial $= \frac{\Sigma \text{masyarakat miskin yang mendapat jaminan sosial}}{\Sigma \text{total masyarakat miskin}} \times 100$
		7. Persentase PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan	Capaian PMKS penerima fasilitas pemberdayaan sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan dibandingkan PMKS penerima fasilitas pemberdayaan sosial	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang meningkat kesejahteraannya $= \frac{\Sigma \text{PMKS penerima fasilitas yang meningkat kesejahteraannya}}{\Sigma \text{PMKS penerima fasilitas pemberdayaan sosial}} \times 100$
		8. Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	Capaian PMKS yang mendapat bimbingan sosial keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang meningkat kesejahteraannya dibandingkan PMKS yang dikembangkan $= \frac{\Sigma \text{PMKS penerima fasilitas yang meningkat kesejahteraannya}}{\Sigma \text{PMKS yang dikembangkan}} \times 100$
		9. Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial	Capaian PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial dibandingkan total PMKS pada Balai Perlindungan Sosial	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang dilayani dan dilindungi $= \frac{\Sigma \text{PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial}}{\Sigma \text{total PMKS pada Balai Perlindungan Sosial}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik." "Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat	$K_n \square \frac{Wu_n \square 100}{\square Ws_n}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koefisien Indikator Utama ke-n - Bobot Indikator Utama ke-n - Bobot Sub Indikator dari Indikator Utama ke-n 																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																				
			<p>mendasar. Indikator Utama tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tenaga kerja; 2. Penduduk dan tenaga kerja; 3. Kesempatan kerja; 4. Pelatihan kerja; 5. Produktivitas tenaga kerja; 6. Hubungan Industrial; 7. Kondisi lingkungan kerja; 8. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja; 9. Jaminan sosial tenaga kerja. 																					
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																						
		1. Nilai IKM	<p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25</p>	<p>$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																				
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																				
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																				
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
					4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
		2. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja	Nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja	$X_{20} = \frac{\sum PDRB}{\sum PTB} \times 100$ <p>Dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> X_{20} : Nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja dari Provinsi j $\sum PDRB$: Jumlah Produk Domestik Regional Bruto $\sum PTB$: Jumlah Penduduk yang bekerja 					
		3. Capaian Hubungan Industrial	<p>a. Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan Nilai aktual tingkat LKS Bipartit di perusahaan dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan menengah dan besar yang wajib lapor dan memiliki LKS Bipartit dengan total perusahaan menengah dan besar yang wajib lapor.</p> <p>b. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Untuk menghitung tingkat perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan membandingkan total perselisihan hubungan industrial dengan total</p>	$X_{63j} = \frac{\sum PWBT}{\sum PW_{MB}} \times 100$ <p>Dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> X_{63j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang mempunyai lembaga bipartit dari Provinsi j $\sum PWBT$: Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai LKS Bipartit $\sum PW_{MB}$: Jumlah perusahaan menengah besar yang wajib lapor $X_{64j} = \frac{\sum PHI}{\sum PW} \times 100$ <p>Dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> X_{64j} : Nilai aktual tingkat perselisihan hubungan industrial dari Provinsi j $\sum PHI$: Jumlah perselisihan hubungan industrial $\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor 					

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>perusahaan wajib lapor.</p> <p>c. Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan Nilai aktual tingkat peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib lapor yang telah memiliki PP dengan total perusahaan wajib lapor.</p> <p>d. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan Untuk menghitung tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan adalah dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib lapor yang telah memiliki PKB dengan total perusahaan wajib lapor</p>	$X_{61j} = \frac{\sum PWPP}{\sum PW} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{61j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang mempunyai PP dari Provinsi j</p> <p>$\sum PWPP$: Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai PP yang disahkan</p> <p>$\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor</p> $X_{62j} = \frac{\sum PWPKB}{\sum PW} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{62j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang mempunyai PKB dari Provinsi j</p> <p>$\sum PWPKB$: Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai PKB</p> <p>$\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor</p>
		4. Capaian Pengupahan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan	<p>Proporsi Besaran Upah Minimum terhadap KHL (Kebutuhan Hidup Layak)</p> <p>Tingkat besaran UMP terhadap KHL dihitung dengan cara membandingkan besaran UMP dengan kebutuhan hidup layak (KHL)</p>	$X_{81j} = \frac{UMP}{KHL} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{81j} : Nilai aktual tingkat besaran UMP dari Provinsi j</p> <p>UMP : Upah minimum Provinsi</p> <p>KHL : Kebutuhan hidup layak</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		5. Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>a. Tingkat Pekerja/Buruh yang Menjadi Anggota BPJS Aktif</p> <p>Untuk menghitung tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dilakukan dengan cara membandingkan total perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif dengan total perusahaan wajib jamsostek.</p> <p>b. Tingkat Perusahaan yang menjadi Anggota BPJS</p> <p>Untuk menghitung tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dilakukan dengan cara membandingkan total perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif dengan total perusahaan wajib jamsostek</p>	$X_{92j} = \frac{\sum TKJSTK}{\sum TKPW} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{92j} : Nilai aktual tingkat pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek dari Provinsi j</p> <p>$\sum TKJSTK$: Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif</p> <p>$\sum TKPW$: Jumlah pekerja/buruh di perusahaan wajib lapor</p> $X_{91j} = \frac{\sum PWJSTK}{\sum PW} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{91j} : Nilai aktual tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dari Provinsi j</p> <p>$\sum PWJSTK$: Jumlah perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif</p> <p>$\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib jamsostek</p>
		a. Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja	a. Tingkat Kepatuhan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Provinsi	$X_{73j} = \frac{\sum PW}{\sum P_{Kecil-Besar}} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{73j} : Nilai aktual tingkat kepatuhan perusahaan wajib ketenagakerjaan di perusahaan dari Provinsi j</p> <p>$\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor</p> <p>$\sum P_{Kecil-Besar}$: Jumlah perusahaan kecil, menengah dan besar</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>perusahaan kecil, menengah dan besar</p> <p>b. Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan</p> <p>Dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan yang diaudit penerapan SMK3 dengan total perusahaan wajib lapor</p> <p>c. Tingkat Kecelakaan Kerja Penghitungan tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan wajib lapor dengan total tenaga kerja di perusahaan wajib lapor</p>	$X_{71j} = \frac{\sum PWSMK3}{\sum PW} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{71j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang menerapkan SMK3 dari Provinsi j</p> <p>$\sum PWSMK3$: Jumlah perusahaan yang diaudit menerapkan SMK3</p> <p>$\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor</p> $X_{72j} = \frac{\sum TKKK}{\sum TKPW} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{72j} : Nilai aktual tingkat kecelakaan kerja pada perusahaan wajib lapor dari Provinsi j</p> <p>$\sum TKKK$: Jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada perusahaan wajib lapor</p> <p>$\sum TKPW$: Jumlah tenaga kerja pada perusahaan wajib lapor</p>
		d. Capaian Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja Nilai aktual tingkat kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	$X_{33j} = \frac{\sum PYB}{\sum AK} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{33j} : Nilai aktual tingkat kesempatan kerja dari Provinsi j</p> <p>$\sum PYB$: Jumlah penduduk yang bekerja</p> <p>$\sum AK$: Jumlah angkatan kerja</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		e. Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja	<p>a. Tingkat Kapasitas Pelatihan Nilai aktual tingkat kapasitas pelatihan merupakan perbandingan antara daya tampung BLK dengan penganggur terbuka yang berpendidikan SMTP dan SMTA dikalikan dengan perbandingan kabupaten/kota yang memiliki BLK dengan jumlah kabupaten/kota.</p> <p>b. Tingkat Lulusan Pelatihan Tingkat lulusan pelatihan dihitung dengan membandingkan total lulusan peserta pelatihan dengan penganggur terbuka yang berpendidikan SMTP dan SMTA.</p> <p>c. Tingkat Lembaga Latihan Terakreditasi Nilai aktual tingkat lembaga latihan terakreditasi dihitung dengan membandingkan jumlah lembaga latihan (pemerintah dan swasta) yang terakreditasi dengan jumlah keseluruhan lembaga latihan milik pemerintah dan swasta</p>	$X_{41j} = \left(\frac{DTP_{BLK}}{PT_{SMTP-SMTA}} \times \frac{\sum Kab / Kota_{BLK}}{\sum Kab / Kota} \right) \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{41j} : Nilai aktual tingkat kapasitas pelatihan dari Provinsi j</p> <p>DTP_{BLK} : Daya tampung lembaga pelatihan BLK</p> <p>$PT_{SMTP-SMTA}$: Penganggur terbuka (SMTP dan SMTA)</p> <p>$\sum Kab / Kota_{BLK}$: Jumlah Kab/Kota yang memiliki BLK</p> <p>$\sum Kab / Kota$: Jumlah Kab/Kota</p> $X_{42j} = \frac{\sum LPP}{\sum PT_{SMTP-SMTA}} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{42j} : Nilai aktual tingkat lulusan pelatihan dari Provinsi j</p> <p>$\sum LPP$: Jumlah Lulusan peserta pelatihan</p> <p>$\sum PT_{SMTP-SMTA}$: Jumlah Penganggur terbuka (SMTP dan SMTA)</p> $X_{43j} = \frac{\sum BLK_{Terakreditasi}}{\sum BLK_{Pemerintah, swasta}} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>X_{43j} : Nilai aktual tingkat lembaga latihan terakreditasi dari Provinsi j</p> <p>$\sum BLK_{Terakreditasi}$: BLK yang telah diakreditasi</p> <p>$\sum BLK_{Pemerintah, swasta}$: BLK milik pemerintah dan swasta</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Indikator Kinerja Utama (eselon II)		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		
		2. Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	Angka yang menunjukkan kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu	Angka Rata-Rata kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu
		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita/pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan)	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$
		4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan	$IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis))$
		5. Laju pertumbuhan penduduk	Angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu	$r = \frac{(P_t - P_0)}{P_0} \times 100$ $r =$ laju pertumbuhan penduduk $P_t =$ Jumlah penduduk pada tahun t $P_0 =$ Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun P_t dengan P_0

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
				$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ <p>Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t</p>																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																									
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak	Angka yang menunjukkan pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan	$= \frac{\Sigma \text{Data tahun penghitungan}}{\Sigma \text{Data tahun sebelumnya}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak	
		3. Cakupan Perencanaan Responsif Gender	Angka yang menunjukkan jumlah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan	$= \frac{\Sigma \text{Dokumen perencanaan PUG}}{\Sigma \text{Dokumen perencanaan PUG yang seharusnya}} \times 100$
		4. Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah	Angka yang menunjukkan peran perempuan dalam bidang politik, eksekutif dan swasta dalam meningkatkan kualitas hidup	$I = \frac{\Sigma \{EDEP(\text{par} + \text{pem} + \text{dm})\}}{50} \text{ atau Indeks Keterwakilan di Parlemen + Keterwakilan di Pemerintahan + Keterwakilan Tenaga Profesional = Indeks Proporsi Jumlah Perempuan dan Laki-laki dibagi 50}$
		5. Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender	Angka yang menunjukkan keberadaan Lembaga Sadar Gender di Kabupaten/Kota	$= \frac{\Sigma \text{Lembaga Standar Gender yang dibina}}{\Sigma \text{Total Lembaga Standar Gender di Kabupaten/Kota}} \times 100$
		6. Indeks Ketahanan Keluarga	Merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisk-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, dimensi Ketahanan Fisik, dimensi Ketahanan Ekonomi, dimensi	$= \frac{\Sigma \text{nilai setiap indikator yang dikalikan dengan bobot masing-masing indikator}}{\Sigma \text{bobot}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			Ketahanan Sosial-Psikolog dan dimensi Ketahanan Sosial Budaya.	
		7. Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT	Angka yang menunjukkan penyelesaian penanganan dari setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan	$= \frac{\Sigma \text{KDRT yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Kasus KDRT yang dilaporkan}} \times 100$
		8. Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak	Angka yang menunjukkan penyelesaian penanganan dari setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak anak	$= \frac{\Sigma \text{Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan}} \times 100$
		9. Rasio Perlindungan Khusus Anak	Angka yang menunjukkan perlindungan anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran	$= \frac{\Sigma \text{Anak berkebutuhan khusus yang mendapat perlindungan}}{\Sigma \text{Total Anak}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		10. Rasio bayi berakte kelahiran	Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah bayi yang lahir per waktu	$= \frac{\Sigma \text{Bayi ber-akta kelahiran}}{\Sigma \text{Bayi yang lahir}} \times 100$
		11. Rasio Pasangan berakte nikah	Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah pasangan nikah ber-Akta Nikah terhadap jumlah pasangan yang nikah per satuan waktu	$= \frac{\Sigma \text{Pasangan yang menikah ber-Akta Nikah}}{\Sigma \text{Pasangan yang menikah}} \times 100$
		12. Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK	Angka yang menunjukkan jumlah penduduk ber KTP berbasis NIK	$= \frac{\Sigma \text{penduduk ber-KTP-el}}{\Sigma \text{Penduduk Wajib ber-KTP-el}} \times 100$
		13. Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap per 1000 jumlah penduduk per satuan waktu	$= \frac{\Sigma \text{jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{1000 \text{ penduduk}}$
		14. Cakupan data dan informasi kependudukan	Keterangan kualitatif yang menunjukkan ketersediaan data dan informasi kependudukan per satuan waktu	Ada/Tidak Ada
		15. Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	Angka yang menunjukkan rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tersentu)	TFR = $5 \Sigma \text{ASFR}_i$ Atau Tingkat Fertilitas Total = 5 x Jumlah Angka Fertilitas menurut Umur
		16. Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence</i>)	Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu	$= \frac{\Sigma \text{Peserta KB Aktif}}{\Sigma \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		<i>rate/CPR)</i>		
		17. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase yang menunjukkan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani terhadap seluruh jumlah pasangan usia subur	$= \frac{\Delta \text{PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\Delta \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100$
		18. Tingkat putus pakai kontrasepsi	Angka yang menunjukkan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap seluruh jumlah akseptor KB	$= \frac{\Delta \text{Pasangan Usia Subur Yang Tidak Lagi Menggunakan Kontrasepsi}}{\Delta \text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																			
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN																			
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																
			TOTAL	100																			
		2. Indeks Ketahanan Pangan Daerah																					
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																					
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																			
				IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> </tbody> </table>					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																			
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																			

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
				3	2,51 – 3,25	62,51 81,25	-	B	Baik
				4	3,26 – 4,00	81,26 - 100		A	Sangat Baik
		2. Ketersediaan pangan	Suatu kondisi penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan berikut turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu	$TD = O - \Delta St + M - X - (F + S + I + W)$ <p>Keterangan :</p> <p>(TD = ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk; O = Produksi masukan/keluaran; ΔSt = Perubahan stok; M = Impor; X = Ekspor; F = Pakan; S = Bibit; I = Industri (makanan dan bukan makanan); W = Tercecer</p>					
		3. Keterjangkauan/akses pangan	Kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup, melalui berbagai sumber atau kombinasi cadangan pangan yang dimiliki, hasil produksi pangan, pembelian/barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan. Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/tahunan	<p>1) Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)</p> $K = \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{n}$ <p>2) Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a) K_i = Ketersediaan informasi menurut i Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses</p> <p>b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu</p> <p>c) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu</p> <p>Target komoditas, target lokasi (Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing Daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing Daerah.</p>					

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		4. Pemanfaatan Pangan	Jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu, yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH)	<p>Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok Pangan Skor PPH</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Prosentase (%) AKG = $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$</p> </div>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua mata yang mencakup udara, air, dan hutan.	$IKLH \text{ Provinsi} = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>Keterangan : IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat Provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan</p>																																
		3. Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Perbandingan Luas Kawasan Hutan ditambah dengan Tutupan Hutan diluar Kawasan Hutan yang memiliki kerapatan (vegetasi) diatas 50% dibagi luas Provinsi Banten	$\text{Rasio Tutupan Hutan} = \frac{KH + TH \text{ diluar KH}}{\text{Luas Provinsi}} + x 100\%$ <p>Keterangan : KH = Kawasan Hutan TH = Tutupan Hutan</p>																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
				Catatan: 1. Identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode/Teknik NDVI (<i>Normalized Difference Vegetation Index</i>) dari Citra Landsat 8 Tahun 2016 2. Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS/Banten dalam angka																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																									
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		2. Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat (kondisi) kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_M^2 + (C_i / L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>IP_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j, C_i = konsentrasi parameter kualitas air i, L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j, M = maksimum, R = rerata.</p>
		3. Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IPU = \frac{IPU_{NO2} + IPU_{SO2}}{2}$ <p>IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂ IPSO₂ = Indeks Pencemar SO₂</p>
		4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	JumlahKelompok atau Lembaga seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		5. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman vegetative maupun sipil teknis (embung, turap, sumur resapan dll)	Jumlah Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jumlah Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha
		6. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	Rasio peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat dihitung dari produksi kayu	$RPPK = \frac{\text{Produksi Kayu (M3)}}{\text{Kapasitas Terpasang Mesin Industri}} \times 100\%$ <p>RPPK = Rasio Peningkatan Produksi Kayu</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																												
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																														
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<p style="text-align: center;">ASPEK PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																													
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																													
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																													
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																													
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																													
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																													
TOTAL		100																														
		2. Persentase Desa Mandiri	Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk melihat tingkat perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, IPD dimaksudkan sebagai instrumen: (a) perencanaan pembangunan desa di	<p>a. Penghitungan bobot tiap indikator dalam faktor dengan formula:</p> $B = \frac{LF}{RLF} \times RSSL$ <p>Keterangan: <i>B</i> = nilai bobot, <i>LF</i> = nilai <i>loading factor</i>, <i>RLF</i> = rata-rata <i>loading factor</i> dalam satu faktor, <i>RSSL</i> = nilai <i>rotation sums of squared loading (% of variance)</i>.</p> <p>b. Penghitungan kontribusi tiap indikator dengan formula:</p> $b = \frac{B}{JB}$ <p>Keterangan:</p>																												

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>Indonesia; (b) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa; dan (c) pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2015–2019 di Indonesia.</p> <p>Desa Mandiri adalah desa yang Mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/ transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan</p>	<p><i>b</i> =nilai kontribusi, <i>B</i> =nilai bobot, <i>JB</i> =jumlah semua bobot.</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			desa dengan nilai IPD lebih dari 75.																										
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang	Capaian desa tertinggal menjadi desa berkembang Desa Tertinggal yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis, desa tertinggal merupakan desa yang memiliki nilai	$IPD(b1*V1 + b2*V2 + b3*V3 + \dots + b42*V42)*20$ Keterangan: IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0-100) V1 =Skor indikator ke-1 V2 =Skor indikator ke - 2																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			IPD kurang dari atau sama dengan 50.	<p>V3 =Skor indikator ke - 3</p> <p>V42 =Skor indikator ke - 42</p> <p>b1 =Penimbang/pembobot indikator ke- 1</p> <p>b2 =Penimbang/pembobot indikator ke- 2</p> <p>b3 =Penimbang/pembobot indikator ke- 3</p> <p>b42 =Penimbang/pembobot indikator ke- 42</p>
		3. Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri	Capaian desa berkembang menjadi desa mandiri Desa Berkembang yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis, desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75.	<p>IPD $(b1*V1 + b2*V2 + b3*V3 + \dots + b42*V42)*20$</p> <p>Keterangan:</p> <p>IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0-100)</p> <p>V1 =Skor indikator ke-1</p> <p>V2 =Skor indikator ke - 2</p> <p>V3 =Skor indikator ke - 3</p> <p>V42 =Skor indikator ke - 42</p> <p>b1 =Penimbang/pembobot indikator ke- 1</p> <p>b2 =Penimbang/pembobot indikator ke- 2</p> <p>b3 =Penimbang/pembobot indikator ke- 3</p> <p>b42=Penimbang/pembobot indikator ke- 42</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		4. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik	Capaian lembaga kemasyarakatan desa dalam kategori baik dibandingkan total lembaga kemasyarakatan desa	$= \frac{\Sigma \text{Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik}}{\Sigma \text{Total Lembaga Kemasyarakatan Desa}} \times 100$
		5. Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	Capaian kerjasama desa yang meningkatkan menjadi desa mandiri	$= \frac{\Sigma \text{Kerjasama Desa yang meningkat menjadi Desa Mandiri}}{\Sigma \text{Total Kerjasama Desa}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
14.	Dinas Perhubungan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th></th> <th>KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN					KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya		TOTAL	100	
ASPEK PENILAIAN																																				
	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
	TOTAL	100																																		
		2. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Perhitungan terhadap penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	<p>Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah kecelakaan tahun } n}{\text{Jumlah kecelakaan tahun } n - 1} \times 100\%$																																
		3. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan kewenangan Provinsi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$																																
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																																		

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan	Capaian regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk meningkatkan pelayanan dibidang transportasi, perlu diketahui seberapa banyak regulasi dan pelayanan transportasi yang ada dan yang telah diterapkan.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah regulasi dan pedoman standar pelayanan yang diterapkan}}{\text{Jumlah regulasi dan pedoman standar pelayanan yang ada}} \times 100\%$																									
		3. Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum	Cakupan wilayah Provinsi Banten yang sudah terlayani oleh angkutan umum.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak wilayah di Provinsi Banten yang belum terlayani oleh angkutan umum. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan pelayanan angkutan umum, konektivitas dan jaringan trayek yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Luas wilayah yang terlayani angkutan umum}}{\text{Luas wilayah Provinsi Banten}} \times 100\%$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		4. Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan Provinsi	Cakupan pengaturan rekayasa lalu lintas di seluruh ruas jalan Provinsi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih sering terjadinya kemacetan akibat masih belum seimbangnya rasio jalan dan kendaraan yang ada ataupun karena adanya kegiatan yang memanfaatkan ruas jalan Provinsi sehingga perlu pengaturan rekayasa lalu lintas</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{jumlah ruas jalan provinsi yang dilakukan pengaturan rekayasa lalulintas}}{\text{ruas jalan Provinsi Banten}} \times 100\%$
		5. Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi	Pemenuhan kebutuhan Terminal Type B yang merupakan kewenangan Provinsi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: sebagai upaya pemenuhan terminal type B untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah terminal Tipe B yang beroperasi}}{\text{Jumlah Terminal Tipe B yang dibutuhkan}} \times 100\%$
		6. Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan	Cakupan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk meningkatkan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Provinsi.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rambu lalu lintas yang tersedia}}{\text{Jumlah rambu lalulintas yang dibutuhkan}} \times 100\%$
		7. Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian	Cakupan pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai upaya menurunkan kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang antar ajalan raya dengan jalan keretaapian.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{jumlah perlintasan yang telah dibangun dan dipelihara}}{\text{Jumlah perlintasan yang diperlukan}} \times 100\%$
		8. Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional	Beroperasinya seluruh pelabuhan pengumpan regional yang dibutuhkan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak wilayah di Provinsi Banten yang belum terlayani oleh angkutan umum. Untuk itu diperlukan peningkatan cakupan wilayah pelayanan angkutan umum.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p>

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
				$\frac{\text{Jumlah pelabuhan penguapan regional yang beroperasi}}{\text{Jumlah Pelabuhan pengumpan regional yang dibutuhkan}} \times 100\%$
		9. Persentase Pengendalian Penertiban dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan	Cakupan pengendalian penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan dalam mendukung pergerakan barang, orang, dan jasa.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: dalam penyelenggaraan angkutan perlu dilakukan pengendalian penertiban dan pengawasan baik terhadap sarana angkutan maupun pengemudi.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{jumlah ruas jalan provinsi yang dilakukan pengendalian penertiban dan pengawasan}}{\text{ruas jalan Provinsi Banten}} \times 100\%$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
15.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	E-Government (e-Gov) merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi dapat menggunakan pelayanan secara elektronik.</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Masyarakat yang terlayani e-Gov}}{\sum \text{Permohonan Pelayanan e-Gov}} \times 100 \%$</p>																																
		3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih perlunya peningkatan keterbukaan informasi public dari perangkat daerah di Provinsi Banten.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p>																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			tersebut untuk masyarakat luas	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang membuka akses atas informasi publik}}{\text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase ketersediaan perangkat TI	Persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan e-government di Provinsi Banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada	Persentase ketersediaan perangkat TI : $\frac{\sum \text{Perangkat teknologi informasi yang mendukung e-gov}}{\text{Ketersediaan perangkat TI yang ada}} \times 100 \%$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		3. Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase capaian pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian Nilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan public terhadap capaian pengelolaan komunikasi dan informasi.	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: Pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan $\sum \frac{\text{Nilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan public terhadap capaian pengelolaan komunikasi dan informasi}}{\text{Capaian pengelolaan komunikasi dan informasi}} \times 100 \%$
		4. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana persandian dan keamanan informasi	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan pengamanan informasi di Provinsi Banten terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana persandian dan keamanan informasi: Ketersediaan Sarana dan Prasarana tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten $\sum \frac{\text{Ketersediaan Sarana dan Prasarana tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten}}{\text{Ketersediaan sarana dan prasarana}} \times 100 \%$
		5. Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi	Persentase data dan informasi pembangunan dalam penyajian statistik yang dipergunakan oleh masyarakat terhadap prosentase data dan informasi pembangunan	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi: data dan informasi pembangunan dalam penyajian statistik yang di pergunakan oleh masyarakat $\sum \frac{\text{data dan informasi pembangunan dalam penyajian statistik yang di pergunakan oleh masyarakat}}{\text{data informasi pembangunan dalam penyajian statistik}} \times 100 \%$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Persentase Peningkatan Omset and asset Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Omset, asset, dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina	<p>Persentase Omset, asset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina</p> $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi usaha menengah}}{\text{Jumlah Usaha kecil yang di bina}}$																																
		3. Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Omset Koperasi	Peningkatan persentasi koperasi aktif, Bankable dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina	<p>persentasi koperasi aktif, Bankable dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina</p> $\frac{\text{Koperasi aktif, Bankable dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi}}{\text{Jumlah koperasi yang di bina}}$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra dengan dunia usaha terhadap usaha kecil yang dibina	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain: $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bermitra dengan dunia usaha}}{\text{Jumlah Usaha kecil yang di bina}}$																									
		3. Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil	Peningkatan Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan usaha kecil: $\frac{\text{Jumlah Implementasi Hasil pelatihan Usaha Kecil}}{\text{Jumlah Total peserta usaha kecil}}$																									
		4. Capaian Koperasi Aktif	-Peningkatan persentase realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP, KSPPS, USPPS terhadap koperasi yang	-Persentase peningkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/USPPS terhadap jumlah koperasi yang dibina																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			dibina. -Peningkatan koperasi aktif cukup berkualitas terhadap total koperasi yang dibina	$\frac{\text{Koperasi sehat (KSP, USP, KSPPS, USPPS)}}{\text{Jumlah koperasi yang di bina}}$ <p>-Persentase realisasi koperasi aktif cukup berkualitas terhadap terhadap koperasi yang dibina :</p> $\frac{\text{Koperasi aktif cukup berkualitas}}{\text{Jumlah koperasi yang di bina}}$
		5. Persentase Koperasi yang Bankable	Peningkatan persentase koperasi yang meningkat (volume usahanya, kapasitas produksi, asset dan keuntungan) terhadap total koperasi yang dibina	<p>persentase realisasi koperasi yang meningkat (volume usahanya, kapasitas produksi, asset dan keuntungan) terhadap total koperasi yang dibina</p> $\frac{\text{Koperasi yang meningkat (volume usahanya, kapasitas produksi, asset dan keuntungan)}}{\text{Jumlah koperasi yang di bina}}$
		6. Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Koperasi terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)	Peningkatan Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Koperasi terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)	<p>persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Koperasi terhadap total peserta pelatihan Koperasi</p> $\frac{\text{Jumlah Implementasi hasil pelatihan Koperasi}}{\text{Jumlah Peserta pelatihan Koperasi}}$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Jumlah Realisasi Investasi (PMA+PMDN)	Jumlah realisasi PMDN dan realisasi PMA. Tujuannya untuk menghitung realisasi penanaman modal (PMDN+PMA).	Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Realiasi PMA} + \text{Realisasi PMDN}}{\text{Jumlah Realiasi PMA} + \text{Realisasi PMDN}}$																																
		3. Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	Penilaian atas kualitas layanan DPMPTSP dari aspek publik yang menggunakan layanannya. Tujuannya untuk melihat tingkat kualitas layanan DPMPTSP kepada publik, semakin tinggi nilai IKM, semakin baik, artinya semakin	Rumus Perhitungan : $\frac{\sum \text{Jumlah masyarakat yang menilai kinerja DPMPTSP baik}}{\sum \text{masyarakat yang menggunakan layanan DPMPTSP}} \times 100$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			banyak masyarakat yang merasakan profesionalitas DPMPTSP																										
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Nilai Realisasi Investasi PMDN	Jumlah nilai uang yang dibelanjakan oleh perusahaan PMDN untuk memulai usaha sampai siap melakukan produksi komersil	Rumusannya: Jumlah nilai investasi PMDN																									
		3. Nilai Realisasi Investasi PMA	Jumlah nilai uang yang dibelanjakan oleh perusahaan PMA untuk memulai usaha sampai siap melakukan produksi komersil	Rumusannya: Jumlah nilai investasi PMA																									
		4. Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal	Rasio jumlah dan jenis data/informasi terkait dinamika ekonomi dan penanaman modal	Rumusannya: Jumlah lembaga yang menerima data dan informasi dibagi jumlah data yang disediakan (159 jenis data)																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			yang disebar kepada publik terkait. Tujuannya untuk menyebarkan data dan informasi ekonomi dan penanaman modal kepada publik/pengambil keputusan. Semakin tinggi nilainya semakin baik. Artinya semakin banyak publik yang memperoleh data dan informasi terkait ekonomi dan penanaman modal	
		5. Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan	Adalah alat ukur dari NSPK (SOP), dimana nilai yang diambil adalah jumlah berijinan yang ditindaklanjuti sesuai SOP, semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik, artinya semakin banyak ijin yang diselesaikan sesuai dengan SOP.	<p>Alasan pemilihan indikator: jumlah berijinan yang ditindaklanjuti sesuai SOP, semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik, artinya semakin banyak ijin yang diselesaikan sesuai dengan SOP</p> $= \frac{\Sigma \text{pengajuan ijin yang ditindaklanjuti sesuai SOP}}{\Sigma \text{pengajuan ijin keseluruhan}} \times 100$
		6. Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi	Adalah indikator untuk mengukur jumlah potensi investasi yang diwujudkan dalam bentuk realisasi investasi. Artinya semakin tinggi nilai cakupannya, berarti semakin banyak potensi investasi yang diakses penanam modal.	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah potensi investasi yang diwujudkan dalam bentuk realisasi investasi. Artinya semakin tinggi nilai cakupannya, berarti semakin banyak potensi investasi yang diakses penanam modal.</p> $= \frac{\Sigma \text{realisasi investasi berdasarkan KBLI}}{\Sigma \text{seluruh KBLI}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Indeks Pembangunan Kepemudaan	Untuk mengidentifikasi dalam pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan	<p>Alasan pemilihan indikator : untuk mengukur jumlah potensi dalam pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan.</p> $\text{Pemuda mandiri} = \frac{\text{Pemuda yang berkarakter Produktif}}{\text{Pemuda yang berdaya saing}}$																																
		3. Indeks Pembangunan Olahraga	Untuk mengidentifikasi dalam peningkatan olahraga prestasi, pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan olahraga.	<p>Alasan pemilihan indikator : untuk mengukur jumlah atlet berprestasi pada tingkat nasional dan internasional</p> $\text{Prestasi (Olahraga Prestasi)} = \frac{\text{Siswa Berolahraga (Olahraga Pendidikan)}}{\text{Olahraga Masyarakat (Pemasalan dan Pembudayaan)}}$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1.Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2.Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri	Adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama dalam kemandirian dan keterampilan dalam berwirausaha	<p>Alasan Pemilihan indikator : untuk mengukur kelompok/organisasi yang berperan dalam kemandirian pemuda.</p> $\text{Pemuda mandiri} = \frac{\text{Organisasi Kepemudaan}}{\text{Kewirausahaan Pemuda}}$																									
		3.Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi	Segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk menuju prestasi olahraga yang lebih baik.	<p>Alasan pemilihan indikator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga.</p> $\text{Prestasi (Olahraga Prestasi)} = \frac{\text{Siswa Berolahraga (Olahraga Pendidikan)}}{\text{Olahraga Masyarakat (Pemasalan dan Pembudayaan)}}$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		4. Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga	Segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk menuju prestasi olahraga yang lebih baik.	Alasan pemilihan indikator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga. $\text{Prestasi (Olahraga Prestasi)} = \frac{\text{Siswa Berolahraga (Olahraga Pendidikan)}}{\text{Olahraga Masyarakat (Pemasalan dan Pembudayaan)}}$
		5. Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional	Partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga	Alasan pemilihan indikator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga
		6. Cakupan Pembinaan Olahraga	Pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar guna mendukung olahraga prestasi.	Alasan pemilihan indikator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten dalam pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar. $\text{Prestasi (Olahraga Prestasi)} = \frac{\text{(Pembinaan Olahraga)}}{\text{(Pelatihan Olahraga)}}$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Persentase peningkatan minat baca masyarakat	Meningkatnya sikap positif dan ketertarikan masyarakat terhadap aktifitas membaca melalui indikator : frekuensi membaca per minggu, lama membaca perhari, dan banyak buku yang ditamatkan dalam 1 (satu) tahun.	$\text{Minat baca} = \frac{\sum \text{rata2 tiap indikator minat baca}}{3}$ <p>Skoring minat baca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat rendah (skor ≤ 20) b. Rendah (skor 20,1 – 40) c. Sedang (skor 40,1 – 60) d. Tinggi (skor 60,1 – 80) e. Sangat tinggi (skor 80,1 – 100) 																																
		3. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip Daerah sesuai standar	Tersedianya <i>record centre</i> di Perangkat Daerah Provinsi Banten	$\% \text{ OPD} = \frac{\sum \text{OPD yang memiliki record center}}{\sum \text{Total OPD}} \times 100$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus	Peningkatan kapasitas perpustakaan Provinsi dan perpustakaan Perangkat Daerah	$\% \text{ Cakupan Pemb. Perpust} = \frac{\sum \text{Perpus mencapai standart minimal perpus}}{\sum \text{OPD yang memiliki perpustakaan}} \times 100$																									
		3. Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	Optimalisasi pelaksanaan standar minimal perpustakaan	$\% \text{ Cakupan Pelay Perpust} = \frac{\sum \text{Layanan perpus mencapai standart minimal}}{\sum \text{Perpustakaan lingkup wewenang Provinsi}} \times 100$																									
		4. Persentase Digitalisasi Arsip	Teralih mediakannya arsip statis bernilai sejarah di depo arsip	$\% \text{ Digitalisasi Arsip Statis} = \frac{\sum \text{Arsip statis terdigitalisasi}}{\sum \text{Arsip bernilai sejarah pada depo arsip}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		Statis Daerah	Banten	
		5. Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan digitalisasi arsip dinamis	$\% \text{ Digitalisasi Arsip Dinamis} = \frac{\sum \text{OPD yang melaksanakan digitalisasi}}{\sum \text{Total OPD}} \times 100$
		6. Persentase Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah sesuai Standar	Tersedianya <i>record centre</i> di Perangkat Daerah Provinsi Banten	$\% \text{ Pengelolaan Arsip OPD} = \frac{\sum \text{OPD yang memiliki record center}}{\sum \text{Total OPD}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	Proses kenaikan <i>output</i> perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun	<p>Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007):</p> $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ <p>G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya</p>																																
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																																		

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		1.Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2.Persentase Produksi Perikanan	Pengertian kegiatan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa adalah menghasilkan barang dan jasa yang belum ada sehingga bertambah jumlahnya atau memperbesar ukurannya.	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100 \%$																									
		3.Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	Capaian target area laut wilayah Provinsi Banten yang dapat terawasi dan dijangkau dengan kapal inspeksi pengawas perikanan	$\frac{\text{Jangkauan Operasional Kapal Pengawas Perikanan}}{\text{Target luas laut yang terawasi (Km2)}} \times 100 \%$																									
		4.Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI dari Jumlah Usaha Perikanan yang ada di wilayah Provinsi Banten	$\frac{\text{Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI}}{\text{Target Usaha Perikanan (Unit)}} \times 100 \%$																									
		5.Nilai Tukar Nelayan	Nilai tukar nelayan (NTN) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan																										

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). NTN=100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas.</p>	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan (IT)}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan (IB)}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		
21.	Dinas Pariwisata	Indikator Kinerja Utama (eselon II)				
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN		
				KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
				1	Perencanaan Kinerja	35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
				2	Pengukuran Kinerja	20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
				3	Pelaporan Kinerja	15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
				4	Evaluasi Kinerja	10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi
				5	Pencapaian Kinerja	20 Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya
				TOTAL		100
		2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam hal ini adalah sektor akomodasi makan dan diminum baik dalam PDRB ADHK. Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun peningkatan LPE sektor pariwisata (akomodasi makan dan minum ini) tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja sektor ini	(Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum dalam PDRB ADHK tahun n) dikurangi (Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum PDRB ADHK tahun n-1) di bagi (PDRB Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum ADHK tahun n-1)		

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			<p>sesungguhnya, sebab peningkatan kontribusi dapat disebabkan oleh kinerja sektor akomodasi makan dan minum yang meningkat atau sektor diluar sektor akomodasi makan dan minum kontribusinya yang menurun. Sehingga untuk membuktikan kinerja sektor pariwisata yang meningkat perlu didukung oleh indikator kinerja kunci seperti jumlah kunjungan wisatawan</p>																										
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	<p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25</p>	<p>IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" data-bbox="1198 972 1971 1317"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		2. Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif	Nilai (value) numeric atas jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan (N) pada (tahun n). Semakin banyak nilai yang N yang dihasilkan maka semakin banyak Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan.	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan di (Kabupaten/Kota) di Provinsi Banten oleh Dinas Pariwisata (N) pada (tahun n)
		3. Persentasi Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Pengembangan Destinasi wisata dengan target 2 destinasi unggulan Provinsi Banten pertahun (target 10 destinasi unggulan selama 5 tahun)	Jumlah Destinasi Unggulan pertahun 2 Destinasi di bagi target selama 5 Tahunnya itu 2/10 sehingga muncul target sebesar 20 % pertahun
		4. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Adalah total kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Banten, baik domestik maupun mancanegara	Alasan pemilihan indikator : untuk mengetahui total kunjungan wisatawan di Provinsi Banten
		5. Rata-Rata Lama Kunjungan	Nilai (value) numeric atas rata-rata lama kunjungan (N) wisatawan mancanegara dan/atau wisatawan nusantara ke Provinsi Banten (tahun n). Semakin besar nilai yang N yang dihasilkan maka semakin lama wisatawan berada Provinsi Banten.	Rata-rata dari Jumlah lamanya wisatawan menginap di Provinsi Banten dalam berbagai jenis dan klasifikasi akomodasi di setiap harinya komulatif pada tahun n
		6. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Nilai (value) numeric atas pengeluaran/belanja wisatawan mancanegara dan/atau nusantara (N) ke Provinsi Banten (tahun n). Semakin	Rata-rata dari Jumlah pengeluaran wisatawan dalam berbagai bentuk pengeluaran di setiap harinya komulatif pada tahun n

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		7. Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih per tahun 300 Orang (target 1500 Orang selama 5 Tahun)

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																												
22.	Dinas Pertanian	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																														
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<p style="text-align: center;">ASPEK PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																													
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																													
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																													
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																													
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																													
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																													
TOTAL		100																														
		2. Pertumbuhan Sektor Pertanian	Proses kenaikan <i>output</i> perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ketahun	<p>Laju pertumbuhan sector perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007):</p> $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ <p>G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya</p>																												
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																														

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Capaian Produktivitas Tanaman Padi	Nilai Produktivitas tanaman padi adalah produksi padi per satuan luas lahan dan diukur dalam satuan Kw/Ha. Perhitungan produktivitas Padi dengan metode Ubinan. Luas Ubinan 2,5 m X 2,5 m.	$\text{Produktivitas} = \text{Hasil Berat Ubinan} \times \frac{1 \text{ Ha Lahan}}{\text{Luas Ubinan}}$																									
		3. Capaian produksi tanaman padi	Produksi Padi adalah jumlah <i>output</i> atau hasil panen padi dari luas lahan selama satu kali musim tanam dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) yang diukur dalam satuan Ton	$\text{Produksi} = \text{Luas Panen} \times \text{Produktivitas}$																									
		4. Capaian produksi tanaman jagung	Produksi Jagung adalah jumlah <i>output</i> atau hasil panen Jagung dari luas lahan selama satu kali musim tanam dalam bentuk Pipilan Kering Jagung yang	$\text{Produksi} = \text{Luas Panen} \times \text{Produktivitas}$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			diukur dalam satuan Ton	
		5. Capaian produksi tanaman kedelai	Produksi Kedelai adalah jumlah <i>output</i> atau hasil panen Kedelai dari luas lahan selama satu kali musim tanam dalam bentuk Biji Kering yang diukur dalam satuan Ton	$Produksi = Luas\ Panen \times Produktivitas$
		6. Capaian produksi tanaman cabai	Merupakan jumlah total produksi cabai dari luas lahan tersedia pada masa tanam cabai (9-12 bulan). Diukur dengan satuan Ton	$Produksi = Luas\ Panen \times Produktivitas$
		7. Capaian produksi tanaman bawang	Merupakan jumlah total produksi Bawang dari luas lahan tersedia selama satu musim tanam. Diukur dengan satuan Ton	$Produksi = Luas\ Panen \times Produktivitas$
		8. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao	Nilai Produktivitas Kakao adalah produksi kakao per satuan luas lahan dan diukur dalam satuan ton/Ha.	$Produktivitas = \frac{Produksi}{Luas\ Panen}$
		9. Capaian produksi tanaman aren	Merupakan jumlah total produksi aren dari luas lahan tersedia dalam satu tahun dan diukur dengan satuan Ton	$Produksi = Luas\ Panen \times Produktivitas$
		10. Capaian produksi tanaman kelapa	Merupakan jumlah total produksi kelapa dari luas lahan tersedia dalam satu tahun dan	$Produksi = Luas\ Panen \times Produktivitas$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			diukur dengan satuan Ton	
		11. Peningkatan Produksi Daging	Merupakan jumlah daging yang dihasilkan dari setiap ekor/unit ternak yang di potong pada RPH maupun diluar RPH. Produksi daging pada setiap ekornya sangat dipengaruhi oleh jumlah karkas yang dihasilkan. Karkas adalah hasil pemotongan ternak dikurangi kaki, organ dalam, kepala, kulit ekor dan darah.	$Produksi\ Daging = \% Karkas \times Jumlah\ Ternak\ yang\ dipotong$
		12. Persentase sarana produksi pertanian	Merupakan capaian penyediaan sarana produksi pertanian (traktor dan Pompa air) dibandingkan dengan kebutuhan sarana produksi pada tahun berjalan	FormulasiPerhitungan : $\frac{Realisasi\ Penyediaan\ Sarana\ Produksi}{Rencana\ Kebutuhan\ Sarana\ Produksi} \times 100\ %$
		13. Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Merupakan capaian pengendalian dan Pengujian PHM (Rabies, Brucellosis, AI, dan Gangrep) yang dilakukan pada Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner serta Bidang Keswan dan Kesmavet dan diukur dengan satuan sampel	FormulasiPerhitungan : $\frac{Realisasi\ Pengendalian\ dan\ Pengujian\ PHM}{Rencana\ Pengendalian\ dan\ Pengujian\ PHM} \times 100\ %$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																												
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																														
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<p style="text-align: center;">ASPEK PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																													
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																													
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																													
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																													
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																													
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																													
TOTAL		100																														
		2. Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau Negara	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Banten yang telah terlayani aliran listrik.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\Sigma \text{penduduk yang telah mendapat listrik}}{\Sigma \text{Penduduk Provinsi Banten}} \times 100\%$																												
		3. Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	Perhitungan terhadap pertumbuhan sektor-sektor di bidang sumber daya mineral.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah PDRB dibidang SDM tahun } n}{\text{Jumlah PDRB dibidang SDM tahun } n - 1} \times 100\%$																												

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan	Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi terhadap perijinan yang telah dikeluarkan harus berjalan dengan baik dan optimal.	Alasan pemilihan indikator: Untuk pelayanan REKOMTEK air tanah dan MINERBA. Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Permohonan REKOMTEK Air Tanah dan MINERBA Terlayani dan Terawasi}}{\sum \text{permohonan REKOMTEK}} \times 100\%$																									
		3. Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standard	Seluruh badan usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Banten harus memenuhi standard	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi standard. Formulasi Perhitungan:																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
				$\frac{\Sigma \text{Ijin Usaha Pertambangan sesuai standar}}{\Sigma \text{Ijin Usaha Pertambangan}} \times 100\%$
		4. Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan	Terpenuhinya pelayanan listrik di seluruh desa di Provinsi Banten	Alasan pemilihan indikator: Masih terdapat beberapa desa yang belum teraliri listrik melalui program PLN. Formulasi Perhitungan: Jumlah Rumah Tangga di Perdesaan yang mendapatkan bantuan Energi Listrik Rumah Tangga
		5. Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standard	Tersedianya pelaku usaha ketenaga listrikan yang memenuhi standard	Alasan pemilihan indikator: Masih banyaknya pelaku usaha ketenagalistrikan yang belum memenuhi standard. Formulasi Perhitungan: $\frac{\Sigma \text{Pelaku Usaha Ketenagalistrikan sesuai standar}}{\Sigma \text{Pelaku Usaha Ketenagalistrikan}} \times 100\%$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. LPE Sektor Perindustrian	Menunjukkan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang industri, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. < Kemenperin 2014 >	<p>LPE Sektor Perindustrian</p> $Gi = \frac{PDRB_{i1} - PDRB_{i0}}{PDRB_{i0}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Gi = adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDRB_i = PDRB Sektor Perindustrian pada tahun t PDRB₀ = PDRB Sektor Perindustrian tahun dasar.</p>																																
		3. Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis	Tingkat inflasi menunjukkan persentase tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang pokok (beras, rokok, gula, jagung kedelai, minyak goreng, daging beku, bawang merah)	<p>Tingkat inflasi</p> $Laju\ Inflasi = \frac{IHK_n - IHK_0}{IHK_0} \times 100\%$ <p>Keterangan: IHK_n = Indeks Harga Konsumen pada tahun n IHK₀ = Indeks Harga Konsumen pada tahun 0</p>																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			dan bahan galian strategis (aspalt, bijih besi, minyak bumi, dan bahan tambang) <Bregman EM, Feses EJ. 2003>																										
		4. LPE Sektor Perdagangan	Menunjukkan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. <David, FR. 2014. Strategi Management >	LPE sektor perdagangan $Gi = \frac{PDRB_{i1} - PDRB_{i0}}{PDRB_{i0}} \times 100\%$ Keterangan: G = adalah tingkat pertumbuhan sektor Perdagangan yang dinyatakan dalam persen. PDRB i_t = PDRB Sektor Perdagangan pada tahun t PDRB o = pendapatan Daerah pada tahun dasar.																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																									
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah	Persentase Akumulatif harga kebutuhan bahan pokok yang diharapkan tidak lebih kurang dari 5%	$KVH = \frac{t - (t - 1)}{(t - 1)} \times 100\%$ <p>Keterangan: t = Tahun Berjalan</p>																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
				t-1 = Tahun yang lalu
		3. Pertumbuhan Omset Pedagang	Persentase pendapatan keuntungan pedagang dalam periode tertentu dihitung dengan <i>growt percentage over one years</i> . <David, FR. 2014. Strategi Management >	$GPO = \frac{FV - SV}{SV} \times 100$ Keterangan GPO = <i>growt percentage over one years</i> FV = <i>final value</i> SV = <i>start value</i>
		4. Capaian stabilitas harga barang pokok	Penghitungan yang menunjukkan tingkat pencapaian stabilitas harga pada tingkat tertentu dari laju inflasi yang berjalan. Hasil akan berbentuk persentase. <Industrial and regional Cluster Concept>	$SH = \frac{t - (t - 1)}{(t - 1)} \times 100\%$ Keterangan: t = Tahun Berjalan t-1 = Tahun yang lalu
		5. Neraca ketersediaan barang pokok	Penjelasan dalam angka yang menunjukkan ketersediaan barang pokok (beras, gula, jagung, minyak goreng, daging beku, ayam ras, rokok, bawang merah) yang keluar masuk Negara/Daerah. <David, FR. 2014. Strategi Management >	$x = \frac{\text{Kebutuhan Persediaan Barang Pokok}}{\text{Tersedianya Barang Pokok}} \times 100\%$
		6. Surplus Neraca Perdagangan (ess III)	Perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu Negara pada periode tertentu diukur menggunakan mata uang yang berlaku akan menjadi surplus atau kelebihan jika ekspor	X= Jumlah Ekspor – Jumlah Impor

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			melebihi impor. <David, FR. 2014. Strategi Management >	
		7. Indeks Tendensi Konsumen	Indeks yang dapat memberikan gambaran mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapatan konsumen yang didasarkan pada persepsi konsumen mengenai keadaan bisnis dan perekonomian	Indeks Tendensi Konsumen terdiri dari dua jenis indeks yaitu indeks pada triwulan berjalan dan indeks prediksi triwulan kedepan. $ITK_{Triwulan\ berjalan} = \text{Indeks Indikator Kini (IIK)}$ $ITK_{Prediksi\ triwulan\ kedepan} = \text{Indeks Indikator Mendatang (IIM)}$
		8. Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi yang sesuai dengan standard pelayanan	Menunjukkan Kesiapan pelayanan dalam pengujian dan mengeluarkan Sertifikasi serta standarisasi sesuai standard pelayanan	$x = \frac{\text{Target Tahun}}{\text{Target Pelayanan 5 Tahun}} \times 100\%$ Keterangan: t = Tahun Berjalan t-1 = Tahun yang lalu
		9. Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan	Perhitungan dengan menggunakan metode survey atau data sekunder yang menunjukkan persentase struktur industri di suatu Daerah dan mengidentifikasi industri unggulan mana yang telah mendapatkan kebijakan.	$\frac{\sum \text{Industri Unggulan yang telah di Fasilitasi}}{\sum \text{Industri Unggulan}} \times 100\%$
		10. Rasio Pertumbuhan industry kreatif	Membandingkan angka-angka pertumbuhan dalam persentase di bidang industri yang mengandalkan bakat kreatifitas sebagai modal utama.	$RPIK = \frac{\text{Target Tahun Berjalan}}{\text{Target 5 Tahun}} \times 100\%$
		11. Jumlah Kerja sama SDM	Penjelasan bagaimana para tenaga kerja yang memiliki	X = Jumlah Target Yang Terkerjasama

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		Berkompetensi Industri yang Aktif	keahlian di bidang industri atau menempuh pendidikan di bidang pengolahan telah diterima di perusahaan yang bergerak di sektor industri.	
		12. Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi	Menunjukkan produk yang sudah memiliki standard tertentu untuk diperjualkan ke pasar seperti kemasan, kebersihan, bebas bakteri, dan hak cipta.	Jumlah Fasilitasi Produk Industri Kecil yang berstandar dan bersertifikasi

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
25.	Biro Organisasi	Indikator Kinerja Utama (eselon II)							
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN					
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN		
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja		
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran		
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja		
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi		
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya		
				TOTAL		100			
		Indikator Kinerja Program (eselon III)							
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$					
				IKM Unit Pelayanan x 25					
				Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
				1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	
				2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	
				3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	
				4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik	

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai LAKIP B	Prosentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang memiliki nilai Laporan Kinerja B	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah yang memiliki nilai Lakip B $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
26.	Biro Pemerintahan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)						
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN				
				KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN		
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	
			TOTAL	100				
		2. Predikat penilaian LPPD Provinsi Banten (tingkat)	Penilaian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat	Level	Keterangan			
				1	1. Tataran Pengambil Kebijakan terdiri atas: a. 13 aspek; b. 35 fokus; c. 44 IKK. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri atas: a. 8 aspek; b. 17 fokus; c. 21 IKK. 3. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan terdiri atas: a. 24 urusan wajib terdiri dari 75 IKK; b. 8 urusan pilihan terdiri dari 11 IKK.			
				2				
				3				
				4				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan	Merumuskan keselarasan kebijakan perangkat daerah bidang pemerintahan	$\frac{\text{Output Kegiatan/Kebijakan}}{\text{Outcome}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
27.	Biro Perekonomian	Indikator Kinerja Utama (eselon II)							
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN					
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN		
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja		
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran		
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja		
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi		
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya		
			TOTAL	100					
		Indikator Kinerja Program (eselon III)							
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$					
				IKM Unit Pelayanan x 25					
				Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
				1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	
				2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	
		3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik			
		4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik			

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		2. Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi	Merumuskan kebijakan dan mensinergikan kelembagaan perangkat daerah bidang perekonomian dengan melakukan penataan serta pengendalian perekonomian masyarakat yang akan dicapai dan membangun perekonomian masyarakat yang ditargetkan	$\frac{\text{Output Kegiatan/Kebijakan}}{\text{Outcome}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																			
28.	Biro Hukum	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN																			
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																
				TOTAL		100																	
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																					
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																			
				IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> </tbody> </table>					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																			
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																			

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
				3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
				4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
		2. Persentase realisasi target Prolegda	Tercapainya target Prolegda (Program legislasi Daerah)	$= \frac{\sum \text{Legislasi Daerah yang disahkan}}{\sum \text{Legislasi Daerah yang disusun}} \times 100\%$				
		3. Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional	Keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional	$= \frac{\sum \text{Peraturan Perundangan Daerah yang selaras dg Regulasi hukum nasional}}{\sum \text{Peraturan Perundangan Daerah}} \times 100\%$				
		4. Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik	Raperda inisiatif harus memiliki naskah akademik sehingga pembentukan Perda dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui penelitian dan pengkajian hukum	$= \frac{\sum \text{Raperda Inisiatif yang memiliki naskah akademik}}{\sum \text{Raperda Inisiatif}} \times 100\%$				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																			
29.	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN																			
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																
				TOTAL	100																		
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																					
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 –</td> <td>43,76 –</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 –	43,76 –	C	Kurang
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																			
2	1,76 –	43,76 –	C	Kurang																			

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
					2,50	62,50		Baik	
				3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	
				4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik	
		2. Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur	Prosentase capaian kinerja kebijakan infrastruktur	Alasan pemilihan indikator : mengukur capaian kinerja kebijakan infrastruktur $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$					

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																								
30.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																										
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN																								
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																					
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																					
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																					
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																					
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																					
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																					
					TOTAL	100																						
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																										
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																								
				IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 –</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table>					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 –	B	Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																								
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																								
3	2,51 – 3,25	62,51 –	B	Baik																								

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
				4	3,26 - 4,00	81,25 81,26 - 100	A	Sangat Baik
		2. Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase capaian kinerja perumusan kebijakan, koordinasi dan evaluasi bidang Kesejahteraan Rakyat	$= \frac{\text{Capaian Konsep Kebijakan-Koordinasi/ Evaluasi}}{\text{Target Konsep Kebijakan/Koordinasi/Evaluasi}} \times 100\%$				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
31.	Biro Administrasi Pembangunan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)							
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN					
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN		
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja		
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran		
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja		
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi		
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya		
					TOTAL	100			
		Indikator Kinerja Program (eselon III)							
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$					
				IKM Unit Pelayanan x 25					
				Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
				1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	
				2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	
				3	2,51 – 3,25	62,51 –	B	Baik	

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
				4	3,26 - 4,00	81,25 81,26 - 100	A	Sangat Baik
		2. Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Prosentase capaian kinerja perumusan kebijakan, koordinasi dan evaluasi bidang Administrasi Pembangunan	$= \frac{\text{Capaian Konsep Kebijakan-Koordinasi/ Evaluasi}}{\text{Target Konsep Kebijakan/Koordinasi/Evaluasi}} \times 100\%$				
		3. Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase capaian kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pembinaan pengadaan barang dan jasa pemerintah $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																			
32.	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN																			
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																
				TOTAL		100																	
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																					
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																			
				IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 –</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 –	C	Kurang
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																			
2	1,76 – 2,50	43,76 –	C	Kurang																			

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
						62,50		Baik
				3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
				4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
		2. Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Prosentase capaian kinerja pelayanan rumah tangga pimpinan	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan rumah tangga pimpinan $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$				
		3. Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Prosentase capaian kinerja pelayanan tata usaha pimpinan	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan tata usaha pimpinan $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$				
		4. Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan	Prosentase capaian kinerja pelayanan keprotokolan	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan keprotokolan $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																													
33.	Biro Umum	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																															
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN																													
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																										
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																										
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																										
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																										
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																										
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																										
			TOTAL	100																													
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																															
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																													
				IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																													
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																													
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																													
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																													
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																													

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		2. Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian sarana penunjang kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
34.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Capaian Program-program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	Capaian Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD pada tahun berkenaan	<p>Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> $\frac{\text{Capaian program kerja DPRD yang dilaksanakan}}{\text{Target program kerja DPRD yang ditetapkan}} \times 100$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Capaian % Kinerja Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase capaian kinerja fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah $\frac{\text{Capaian program kerja DPRD}}{\text{Target program kerja DPRD}} \times 100$																									
		3. Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Alasan pemilihan indikator: untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi $\frac{\text{Sarpras dan SDM yang tersedia}}{\text{Sarpras dan SDM yang dibutuhkan}}$																									
		4. Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan	Prosentase capaian kinerja pelayanan keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah $\frac{\text{Capaian kinerja pelayanan}}{\text{Target kinerja pelayanan}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
35.	Badan Penghubung	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Capaian pelayanan publik	Kepuasan pelayanan Badan Penghubung sebagai wakil dari Pemerintah Daerah terhadap lembaga dan masyarakat,	<p>1) Indikator : jumlah lembaga yang dilayani dibagi jumlah lembaga :</p> $= \frac{\sum \text{lembaga yang dilayani}}{\sum \text{lembaga}} \times 100\%$ <p>2)Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>>1000</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501-999</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><500</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	>1000	A	Sangat Baik	2	501-999	B	Baik	3	<500	C	Cukup																
Nilai Persepsi	Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																																	
1	>1000	A	Sangat Baik																																	
2	501-999	B	Baik																																	
3	<500	C	Cukup																																	

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis	Prosentase Koordinasi Badan Penghubung terhadap K/L, Kedutaan Besar, Perangkat Daerah, Badan Penghubung Perwakilan dan Swasta	Jumlah yang dikoordinasikan: Jumlah Persentase $= \frac{\text{Jumlah K/L, Kedutaan Besar, OPD, Badan Penghubung Perwakilan dan Swasta yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah K/L, Kedutaan Besar, OPD, Badan Penghubung Perwakilan dan Swasta}} \times 100 \%$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
36.	Inspektorat	Indikator Kinerja Utama (eselon II)							
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN					
				KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN			
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja		
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran		
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja		
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi		
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya		
			TOTAL	100					
		2. Capaian Maturitas SPIP	Untuk menentukan kualitas dalam konteks maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan	Level			Keterangan		
				1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal				
				2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan				
				3 (Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya				
				4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun				

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																										
					evaluasinya tanpa dokumentasi memadai																									
				5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi																									
				6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis																									
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																												
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>		Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																										
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																										
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																										
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																										

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
		2. Capaian nilai SAKIP	Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIPnya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
				1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
				2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
				3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
				4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
				5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
					Total	100%	

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan												
		3. Indek Integritas	Pengukuran dilakukan pada 2 (dua) dimensi integritas, yaitu internal dan eksternal. Dimensi internal diukur dari penilaian yang dilakukan oleh para pegawai, kepada instansinya. Sementara integritas eksternal diukur melalui penilaian pihak luar instansi. Pihak luar ini yang akan memberikan penilaian kepada sebuah instansi, baik melalui persepsi maupun pengalaman mereka dalam mengakses layanan	Indeks Integritas = Integritas Internal + Integritas Eksternal												
		4. Capaian Leveling Kapabilitas APIP	Setiap level penilaian terdiri dari 6 (enam) elemen, yaitu : Perandan layanan Pengawas intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Initial</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Infrastructure</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Integrated</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Managed</i></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><i>Optimizing</i></td> </tr> </tbody> </table>	Level	Keterangan	1	<i>Initial</i>	2	<i>Infrastructure</i>	3	<i>Integrated</i>	4	<i>Managed</i>	5	<i>Optimizing</i>
Level	Keterangan															
1	<i>Initial</i>															
2	<i>Infrastructure</i>															
3	<i>Integrated</i>															
4	<i>Managed</i>															
5	<i>Optimizing</i>															
		5. Capaian OPINI Laporan Keuangan	Merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)</td> </tr> </tbody> </table>	Level	Keterangan	1	Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)	2	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)	3	Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)	4	Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)		
Level	Keterangan															
1	Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)															
2	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)															
3	Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)															
4	Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)															

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
37.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan (RKPD) dengan parameter penilaian Pangripta	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan daerah yang disusun}}{\sum \text{dokumen perencanaan yang sesuai dgn parameter penilaian Pangripta}} \times 100$																																
		3. Cakupan Penelitian dan pengembangan	Capaian penelitian yang dihasilkan dan dimanfaatkan	Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka <i>evidence based policy</i> $\frac{\sum \text{Hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Hasil penelitian yang dilaksanakan}} \times 100$																																
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																																		
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Capaian dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	$\frac{\sum \text{dokumen RPJPD, RTRW dan RPJMD yang disusun}}{\sum \text{dokumen RPJPD, RTRW dan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda}} \times 100$																									
		3. Persentase dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Capaian dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{dokumen RKPD yang disusun}}{\sum \text{dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada}} \times 100$																									
		4. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Capaian proporsi penjabaran program RPJMD yang konsisten ke dalam RKPD	$\frac{\sum \text{program RKPD Tahun berkenaan}}{\sum \text{program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100$																									
		5. Persentase kesesuaian rencana pembangunan	Proporsi kesesuaian program terhadap pola struktur ruang dengan RTRW	$\frac{\text{Kesesuaian program/kegiatan pembangunan thd pola \& struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		dengan RTRW		
		6. Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi	$\frac{\sum Program/kegiatan dalam Renja}{\sum Program/kegiatan dalam RKPD} \times 100$
		7. Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan	$\frac{\sum Program/kegiatan dalam Renja}{\sum Program/kegiatan dalam RKPD} \times 100$
		8. Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	$\frac{\sum Program/kegiatan dalam Renja}{\sum Program/kegiatan dalam RKPD} \times 100$
		9. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	Proporsi hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan	Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka <i>evidence based policy</i> $\frac{\sum Hasil penelitian yang dimanfaatkan}{\sum Hasil penelitian yang dihasilkan}$
		10. Persentase inovasi yang diadopsi	Proporsi inovasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan	Alasan pemilihan indikator: mengukur inovasi yang dilaksanakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka <i>evidence based policy</i> $\frac{\sum Hasil inovasi yang dimanfaatkan}{\sum Hasil inovasi yang dihasilkan}$

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan <i>OUTCOME</i> (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
38.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th></th> <th>KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN					KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya		TOTAL	100	
ASPEK PENILAIAN																																				
	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
	TOTAL	100																																		
		2. Capaian opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Proporsi Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Opini BPK}}{\text{Laporan keuangan pemerintah daerah}} \times 100$																																
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																																		
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
				IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan	Cakupan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Perangkat Daerah yang patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{OPD yang patuh}}{\sum \text{OPD di Provinsi Banten}} \times 100$																									
		3. Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Cakupan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah laporan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Laporan yang sesuai SAP}}{\sum \text{Laporan}} \times 100$																									
		4. Capaian tertib Administrasi Aset Daerah	Seluruh asset Daerah telah sesuai tertib administrasi	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah asset Daerah yang telah tertib administrasi Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Aset daerah yang telah tertib administrasi}}{\sum \text{Aset daerah}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																												
39.	Badan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																														
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<p style="text-align: center;">ASPEK PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																													
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																													
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																													
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																													
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																													
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																													
TOTAL		100																														
		2. Rasio PAD terhadap pendapatan Daerah	Capaian Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan Daerah	<p>Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui pendapatan asli Daerah dibandingkan pendapatan Daerah</p> $= \frac{\sum \text{pendapatan asli daerah}}{\sum \text{pendapatan daerah}} \times 100$																												
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																														
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																		
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																												
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik																												

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
				2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	
				3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	
				4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik	
		2. Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Peningkatan dari jumlah kontribusi Pajak Daerah akan sangat berperan dalam rencana kemandirian Pemerintah Daerah di dalam peningkatan pendapatan Daerah.	Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui peningkatan jumlah kontribusi pajak Daerah $= \frac{\Sigma \text{pajak daerah pada tahun ini}}{\Sigma \text{pendapatan daerah pada tahun yang sama}} \times 100$					
		3. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah	Peningkatan dari jumlah kontribusi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain akan sangat berperan dalam rencana kemandirian Pemerintah Daerah di dalam peningkatan pendapatan daerah.	Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui peningkatan jumlah kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain $= \frac{\Sigma \text{pajak dan retribusi daerah pada tahun ini}}{\Sigma \text{PAD pada tahun yang sama}} \times 100$					
		4. Persentase potensi tunggakan pajak Daerah yang dapat diselesaikan	Proporsi tunggakan pajak Daerah yang dapat diselesaikan	$= \frac{\Sigma \text{potensi tunggakan pajak daerah yang dapat diselesaikan}}{\Sigma \text{potensi tunggakan pajak}} \times 100$					

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																												
40.	Badan Kepegawaian Daerah	Indikator Kinerja Utama (eselon II)																														
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<p style="text-align: center;">ASPEK PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																													
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																													
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																													
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																													
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																													
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																													
TOTAL		100																														
		2. Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN Pemerintah Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian kinerja yang berkategori baik ASN pada setiap bulan diimbangi/sinergi dengan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan	$\text{Indeks Profesionalisme} = \frac{\text{Jumlah ASN yang berkinerja dan berdisiplin baik}}{\text{Jumlah ASN Prov Banten}} \times 100$																												
		Indikator Kinerja Program (eselon III)																														
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$																												

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																									
		2. Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan	Proporsi pegawai yang didistribusikan sesuai kebutuhan dan kompetensinya berdasarkan hasil pemetaan	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kinerja perencanaan dan mutasi pegawai $\frac{\sum ASN \text{ yang didistribusikan sesuai kompetensi}}{\sum ASN \text{ yang dibutuhkan sesuai hasil pemetaan}}$																									
		3. Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai	Proporsi ASN yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai dibandingkan jumlah seluruh ASN Provinsi Banten	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur hasil pembinaan disiplin dan kinerja pegawai $\frac{\sum ASN \text{ yang tidak melanggar disiplin dan kode etik}}{\sum ASN \text{ Provinsi Banten}} \times 100$																									
		4. Prosentase akurasi data kepegawaian	Proporsi jumlah file data base pegawai yang akurat dan update	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kinerja pemutakhiran data dan informasi kepegawaian $\frac{\sum \text{file data base ASN yang up – to – date dan akurat}}{\sum ASN \text{ Provinsi Banten}}$																									
		5. Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	Proporsi pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kinerja pengembangan kompetensi pegawai $\frac{\sum ASN \text{ yang ditempatkan sesuai kompetensi}}{\sum ASN \text{ Provinsi Banten}}$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																
41.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Indikator Kinerja Utama (esselon II)																																		
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASPEK PENILAIAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100	
ASPEK PENILAIAN																																				
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																																	
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																	
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																	
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																	
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi																																	
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> dan Kinerja Lainnya																																	
TOTAL		100																																		
		2. Prosentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	Kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek <i>skill</i> , <i>knowledge</i> dan <i>attitude</i> yang dibuktikan dari sertifikat kelulusan mengikuti kegiatan Pengembangan SDM Aparatur (kegiatan pendidikan dan pelatihan)	$\text{Indeks Kompetensi} = \frac{\text{Jumlah peserta Diklat Dengan Kategori Lulus}}{\text{Jumlah ASN Prov Banten}} \times 100$																																

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Rasio peserta Diklat Kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik	Proporsi peserta diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan yang lulus minimal berkategori "baik" terhadap seluruh peserta diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan pada masing-masing jenis diklat.	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus minimal kategori "Baik", diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta menjadi lebih optimal. $\frac{\sum \text{Peserta diklat Kepemimpinan dan prajabatan, Manajemen dan pemerintahanyg lulus minimal kategori "Baik"}}{\sum \text{Peserta diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen, dan Pemerintahan}} \times 100$																									
		3. Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus	Proporsi peserta diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori "baik" terhadap seluruh peserta diklat Teknis	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus kategori "Baik", diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta menjadi lebih optimal. $\frac{\sum \text{Peserta diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yg lulus kategori "Baik"}}{\sum \text{Peserta diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional}} \times 100$																									

NO	Perangkat Daerah	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		berkategori baik	Umum, Substantif, dan Fungsional pada masing-masing jenis diklat.	
		4. Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat	Proporsi penyelenggara diklat sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan terhadap penyelenggara diklat yang ada	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas penyelenggara diklat. Semakin ideal kompetensi penyelenggara, semakin professional dan optimal penyelenggaraan diklat. $\frac{\text{kompetensi ideal}}{\text{kompetensi yang ada}} \times 100$
		5. Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur	Proporsi penyelenggara diklat sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan terhadap penyelenggara diklat yang ada	Alasan pemilihan indikator: bahan merupakan salah satu penunjang penyelenggaraan diklat. Dengan ketersediaan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan, diharapkan diklat dapat terselenggara dengan optimal. $\frac{\text{bahan penunjang yang dibutuhkan}}{\text{bahan penunjang yang tersedia}} \times 100$

GUBERNUR BANTEN,

ttt

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19680805 199803 1 010